
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI PANDEMI COVID-19 DAN
PENGARUHNYA TERHADAP *REFOCUSING* ANGGARAN PADA APBD KOTA
BONTANG TAHUN ANGGARAN 2021

PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI



Oleh:
JULIANSYAH ROY

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2021**


1. Judul Pengabdian Kepada Masyarakat :

**ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI PANDEMI COVID-19 DAN
PENGARUHNYA TERHADAP *REFOCUSING* ANGGARAN PADA APBD
KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2021**

2. Pelaksana
- a. Nama : Dr. Juliansyah Roy, S.E., M.Si
 - b. NIP : 19810719 200501 1 001
 - c. Pangkat/Gol. : Penata/IIIc
 - d. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor
 - f. Unit Kerja : Fakultas Ekonomi
3. Lokasi Pengabdian : Kota Bontang
4. Waktu Pengabdian : 18 Mei 2021

Samarinda, 21 Mei 2021

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi,



Dr. H. Adi Wijaya, S.E., M.Si
NIP. 19600606 198803 1 1001

Pelaksana,



Dr. Juliansyah Roy, S.E., M.Si
NIP. 19810719 200501 1 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

KATA PENGANTAR

Pujin syukur kehadirat Allah SWT karena atas ijin-Nya jualah maka penulis dapat menyelesaikan laporan pengabdian pada masyarakat ini. Penulis sadar bahwa laporan ini dapat terselesaikan bukan hanya karena kemampuan yang penulis akan tetapi banyak pihak yang turut berperan dalam tulisan in. Oleh karena itu, penulis ingin menyatakan penghargaan dan terima kasih serta doa agar mereka mendapatkan 'balasan' atas segala bantuan mereka.

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dari laporan pengabdian pada masyarakat ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di kemudian hari. Akhirnya semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu per satu dalam tulisan ini, penulis mohon maaf dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan, doa, motivasi, dan kerjasamanya.

Samarinda, 21 Mei 2021.

Penulis,

Juliansyah Roy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAGIAN INTI LAPORAN.....	1
I. IDENTITAS PELAKSANA	1
II. TUGAS	1
III. ISI LAPORAN	1
LAMPIRAN	

BAGIAN INTI LAPORAN

I. IDENTITAS PELAKSANA

1. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Juliansyah Roy, S.E., M.Si.
2. NIP : 19810719 200501 1 001
3. Pangkat/Golongan : Penata/ III C
4. Jabatan Fungsional : Lektor
5. Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Mulawarman
6. Bidang Keahlian : Ilmu Ekonomi

II. TUGAS

1. Melaksanakan Tugas Sebagai : Narasumber
2. Tempat : Kota Bontang
3. Waktu : 18 Mei 2021

III. ISI LAPORAN

A. Pendahuluan

Pandemi COVID -19 hingga saat ini masih berlangsung dan belum menemukan titik henti penyebarannya. Menurut John Hopkins University, hingga tanggal 28 Februari 2021 pukul 10.30 WIB, tercatat 113.315.218 penduduk dunia yang terkonfirmasi positif COVID – 19, termasuk 2.517.964 kasus kematian. Di Indonesia, kasus COVID-19 pertama kali di deteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Dan hingga tanggal 28 Februari 2021, kasus terkonfirmasi positif COVID – 19 sebanyak 1.334.634, termasuk 36.166 kasus kematian. Di Kota Bontang sendiri terdapat 5111 kasus konfirmasi positif COVID – 19 dan 83 orang meninggal pada update tanggal 28 Februari 2021.

Peningkatan jumlah kasus secara merata di seluruh Indonesia memiliki dampak negatif terhadap berbagai sektor, terutama perekonomian. Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak awal bulan Maret 2020 telah memaksa sebagian besar masyarakat untuk membatasi aktifitasnya agar penyebaran virus corona dapat dicegah. Dari semua lini usaha mikro, kecil hingga koperasi sangat terdampak dengan adanya wabah virus corona. Penjualan menurun, permodalan menurun, pesanan menurun, kesulitan bahan baku, dan kredit macet. Ekonomi tiba-tiba ambruk dalam sekejap. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus corona dengan meminta semua pihak untuk melakukan social distancing, Work From Home (WFH) dan memutuskan untuk meliburkan kegiatan perkuliahan dan

kegiatan belajar mengajar. Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro sebagai pengganti kebijakan PPKM yang berlangsung hampir satu bulan di Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut diganti usai Presiden Joko Widodo menilai PPKM tidak efektif menekan lonjakan kasus Covid-19. PPKM dan PPKM Mikro memiliki sejumlah perbedaan yang signifikan. PPKM Mikro lebih longgar dari PPKM pada beberapa sektor. Namun walau dengan kelonggaran pada kebijakan PPKM Mikro tersebut, belum mampu untuk meningkatkan spending atau belanja masyarakat untuk menstimulasi peningkatan perekonomian secara signifikan.

Pemerintah Pusat telah menyiapkan peraturan atau regulasi di antaranya Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan COVID-19, Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Perpres Nomor 52 tahun 2020 tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan COVID-19 atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dan Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro.

Dalam menganggulangi pandemi COVID – 19, Pemerintah Pusat juga mengeluarkan kebijakan refocusing anggaran atau pemusatan kembali dana APBD serta proses realokasi yang dituangkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 . Realokasi APBD dapat dipahami sebagai proses perubahan atau mengalihkan arah tujuan dari suatu kebijakan anggaran yang digunakan berdasarkan kebutuhan yang menyangkut proses pendanaan dalam kebijakan tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka narasumber dapat memberikan arahan dan rekomendasi dalam rangka refocusing perencanaan dan penganggaran tahun 2021 yang cermat dan tepat untuk mendukung pengendalian, penanganan dan pemulihan ekonomi dan reformasi social di masa pandemi COVID – 19.

C. Rekomendasi

1. Ditengah pandemi covid 19, peran swasta dalam menstimulus ekonomi khususnya di Kota Bontang menjadi sangat terbatas, sehingga pemerintah Kota Bontang perlu memaksimalkan perannya dalam menstimulus perekonomian melalui kebijakan anggaran baik berupa belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
2. Skema kebijakan pertama yang perlu diambil oleh pemerintah Kota Bontang adalah skema jaring pengaman sosial baik yang bersumber dari APBN maupun dari APBD,

yang difasilitasi oleh dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut;

- a. Bantuan pangan non tunai (BPNT) sebanyak 4.484 jiwa,
 - b. Program Keluarga Harapan (PKH) 2.356 jiwa,
 - c. Program Keluarga Harapan (PMKS) 642 jiwa (bansos disabilitas) sebesar 41juta,
 - d. bantuan lansia sebesar 200juta untuk 250 jiwa lansia.
 - e. Bantuan langsung tunai keluarga buruh, petani dan nelayan yang tidak terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
 - f. Bantuan langsung tunai kepada para karyawan swasta yang terkena PHK atau dirumahkan.
3. Skema kebijakan kedua yang perlu diambil oleh pemerintah Kota Bontang adalah skema kebijakan ekonomi, dalam bentuk sebagai berikut;
- a. Bantuan langsung tunai bagi pelaku UMK (usaha mikro dan Kecil) dalam hal ini wiraswasta.
 - b. Bantuan modal kerja bagi bagi pedagang.
 - c. Bantuan paket sembako dan pasar murah.
 - d. Memfasilitasi pelatihan dan pendampingin kepada UKM, dalam menyongsong era ekonomi digital.
4. Adapun program yang bisa diprioritaskan dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi khususnya yang terdampak langsung akibat pandemic covid 19 pada dinas koperasi dan usaha mikro adalah sebagai berikut;
- a. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
 - b. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)
 - c. Program Pengembangan UMKM
5. Efektifitas kebijakan penanggulangan dampak ekonomi covid 19 akan sangat ditentukan juga oleh sejauh mana pemerintah bersama seluruh masyarakat Kota Bontang mampu mengendalikan pandemi Covid 19, seperti menjaga dan disiplin menerapkan protokol Kesehatan dan vaksinasi masal.

IV. Surat tugas (terlampir)

V. Bahan presentasi (terlampir)

VI. Absensi (terlampir)

VII. Dokumentasi (terlampir)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Tanah Grogot, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119

Telepon (0541)738913-738915-738916

Laman feb.unmul.ac.id

SURAT TUGAS

No. : 686 /UN17.1/KP/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman menugaskan kepada :

N a m a : Dr. Juliansyah Roy, SE., M.Si

J a b a t a n : Dosen

U n i t K e r j a : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Untuk menjadi Narasumber pada kegiatan Presentasi draft Laporan Akhir Kajian Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pandemi COVID-19 dan Pengaruhnya terhadap Refocusing Anggaran pada APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2021 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 di Ruang Rapat Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 17 Mei 2021

an Dekan

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan,



Dr. H. Irwansyah, S.E., M.M

NIP. 19751110 200112 1 004

Tembusan :
Yang bersangkutan



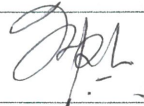


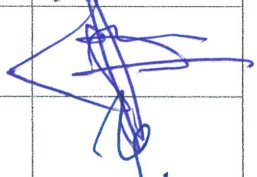






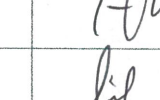
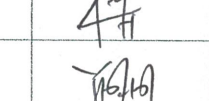

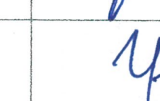
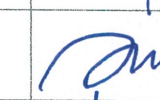
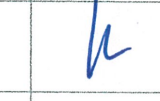
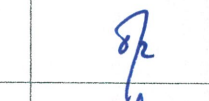

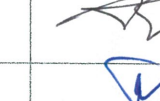
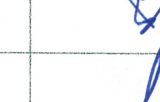


PEMERINTAH KOTA BONTANG

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Moh. Roem Gedung Graha Taman Praja Blok IV Lantai I Telp. (0548) 20393 Fax. (0548) 20400 Website: www.bappedabontang.web.id

DAFTAR HADIR

HARI : Selasa
TANGGAL : 18 Mei 2021
WAKTU : 09.00 WITA s/d Selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Pangripta Bapelitbang Kota Bontang
ACARA : Penyampaian draft Laporan Akhir
Kajian Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19 Di
Kota Bontang & Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Perencanaan
dan Refocusing Anggaran Pada APBD Kota Bontang TA 2021

NO	Nama	Instansi/Jabatan	Telpon/ HP	L/P	Tanda Tangan
1	Dr. Amiruddin, MP	Kepala Bapelitbang		L	
2	Dr. Darnah A.T	Stat Unmul	08525004189	P	
3	Memmi Nor Hayati, M.A	Statistika Unmul	085250754936	P	
4	ATTMAO EFFA	DISPOPAN / Selemba		L	
5	M. EDY PRABOYO	BAPELITBANG		L	
6	Wastiani	DKPS / selet		P	
7	Jamila Syahid	Dinkes / Bid Keang		P	
8	Ryahrudin	Begalitbang		L	
9	Tajuddin Khalil	kec. Btg Barat		L	
10	Herri Susanto	STITEK BONTANG	081224617662	L	
11	YUSRAW	KABID KOPUKM		L	
12	A. Yuni S	KARIP		L	
13	Akus Sugianto	SATPOL-PP Kasubbag perencanaan		L	
14	Fitri Idha.	Bendahara Satpol-PP		P	
15	Aleni Margati	staf Satpol-PP		P	
16	A. Alangah	Kasubbag Perencanaan		L	
17	YOHAN EKA.S	Kasubid ekobang		P	
18	Wikhe Nindirajie	staf Perencanaan		P	
19	Beny Afrani	Perencanaan Naker		P	
20	Sudharman	Distub	082157584126	L	
21	Fina Novba.	staf Perencanaan		P	
22	Ihsan Gusri	RSUD penvung Medik		L	
23	Niken Titiantygi	RSUD, kabid Tjang Medis		P	
24	permiarsh	RSUD		P	









KAJIAN ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI PANDEMI COVID-19 DAN PENGARUHNYA TERHADAP REFOCUSING ANGGARAN PADA APBD KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2021





BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BONTANG
TAHUN 2021



LATAR BELAKANG



Pandemi COVID -19 hingga saat ini masih berlangsung dan belum menemukan titik henti penyebarannya. Di Kota Bontang sendiri terdapat 5111 kasus konfirmasi positif COVID – 19 dan 83 orang meninggal pada update tanggal 28 Februari 2021. Peningkatan jumlah kasus secara merata di seluruh Indonesia memiliki dampak negatif terhadap berbagai sektor, terutama perekonomian. Ekonomi tiba-tiba ambruk dalam sekejap.



Dalam mengganggu pandemi COVID – 19, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan refocusing anggaran atau pemusatan kembali dana APBD serta proses realokasi yang dituangkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 . Realokasi APBD dapat dipahami sebagai proses perubahan atau mengalihkan arah tujuan dari suatu kebijakan anggaran yang digunakan berdasarkan kebutuhan yang menyangkut proses pendanaan dalam kebijakan tersebut.



Mengingat perlunya refocusing pada APBD Kota Bontang tahun 2021 dengan sasaran program-program yang mendukung pengendalian, penanganan dan pemulihan pandemi COVID – 19 serta penyelarasan dokumen-dokumen perencanaan dengan situasi pandemi, perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap sektor-sektor yang terdampak di masa pandemi COVID – 19 agar proses perencanaan dan kebijakan refocusing anggaran terhadap belanja daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kota Bontang tepat sasaran dan bermanfaat.

TUJUAN



1

Mengetahui sektor-sektor utama yang terdampak *COVID-19* di Kota Bontang.

2

Menentukan program prioritas untuk kebutuhan *refocusing* anggaran tahun 2021.

SAMPLING METHOD



Method :

Proportionate stratified random sampling; pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen (strata) yaitu jenis pekerjaan penduduk Kota Bontang (kecuali yang tidak bekerja, ibu rumah tangga dan mahasiswa/pelajar), dan kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata tersebut. Ukuran sampel tiap strata proporsional terhadap jumlah populasi di setiap strata.

Perkiraan *sampling error* : 4,45% ; dengan

Jumlah sampel, $n=500$

Jumlah populasi, $N=56.882$

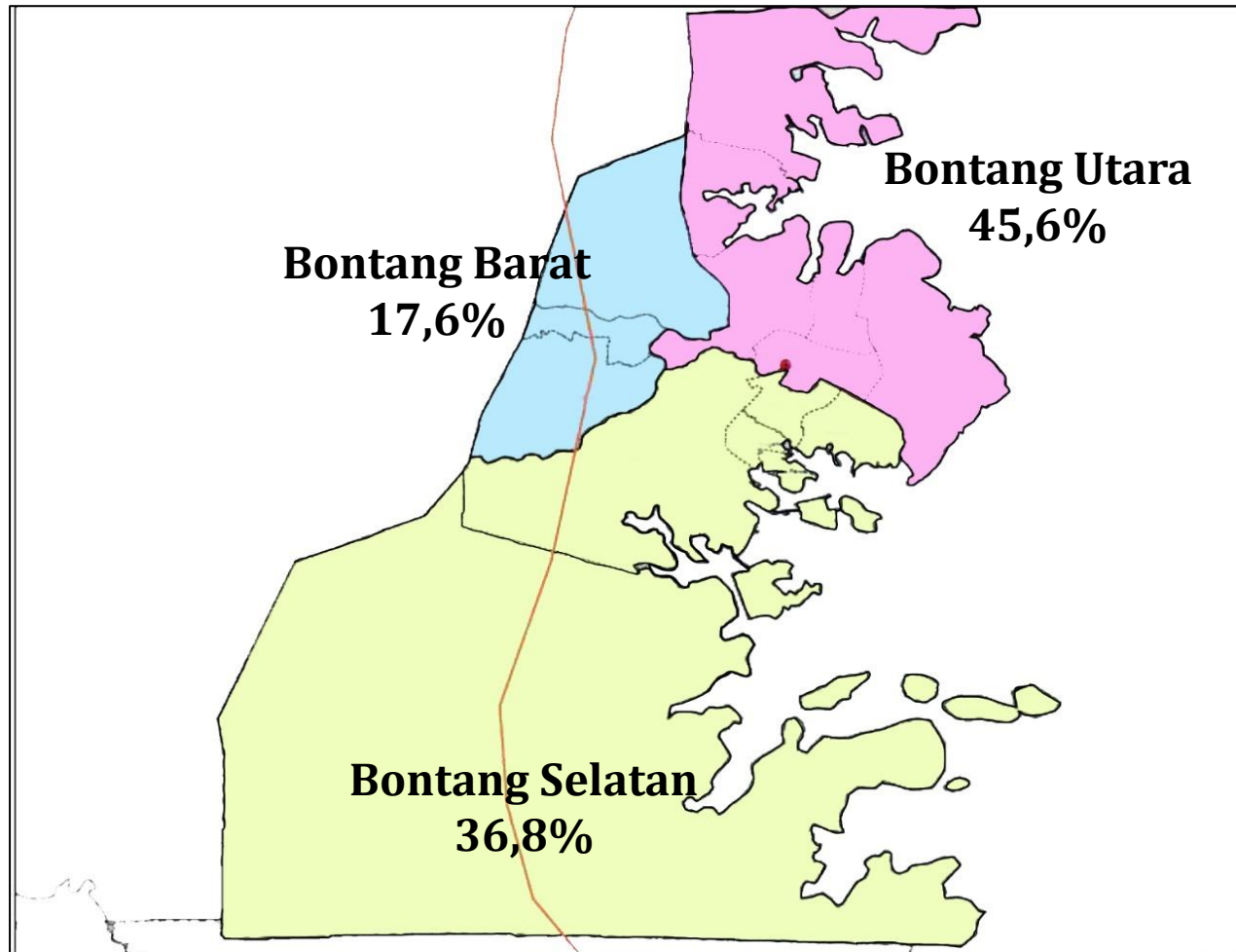
Responden : individu penduduk Kota Bontang pada tiap-tiap strata.

UKURAN SAMPEL SETIAP STRATA

STRATA	Jumlah Sampel
Dosen/Guru	14
PNS, Pensiunan, TNI/POLRI	40
Perdagangan/Pedagang	15
Petani (Pekebun)	13
Nelayan (Perikanan)	15
Karyawan Swasta	245
Karyawan BUMN/BUMD	24
Karyawan Honorer	9
Buruh Harian Lepas/Buruh Tani (Perkebunan)/Buruh Nelayan (Perikanan)/Buruh Peternakan	25
Dokter/Bidan/Perawat/Apoteker	7
Wiraswasta	76
Pekerjaan Lainnya	17
TOTAL	500



DISTRIBUSI RESPONDEN BERDASARKAN KECAMATAN



Kecamatan	Frekuensi	Persentase (%)
Bontang Utara	228	45,6
Bontang Selatan	184	36,8
Bontang Barat	88	17,6

Dari 500 responden, 228 (45,6%) diantaranya berdomisili di Kecamatan Bontang Utara, 184 (36,8%) berdomisili di Kecamatan Bontang Selatan, sedangkan sisanya 88 (17,6%) berdomisili di Kecamatan Bontang Barat.

WAWANCARA MENDALAM (*INDEPTH INTERVIEW*)

Selain melakukan survei pada 500 responden penduduk Kota Bontang, pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap perangkat daerah/instansi terkait untuk mendapatkan informasi program dan sasaran program dalam pencegahan, penanganan, pemulihan ekonomi dan reformasi sosial di masa pandemi COVID - 19, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program yang telah dijalankan. Adapun perangkat daerah/instansi yang dilibatkan dalam wawancara mendalam (*indepth interview*) antara lain:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
5. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
6. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
7. Satuan Pamong Praja



KARAKTERISTIK RESPONDEN



KARAKTERISTIK RESPONDEN

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



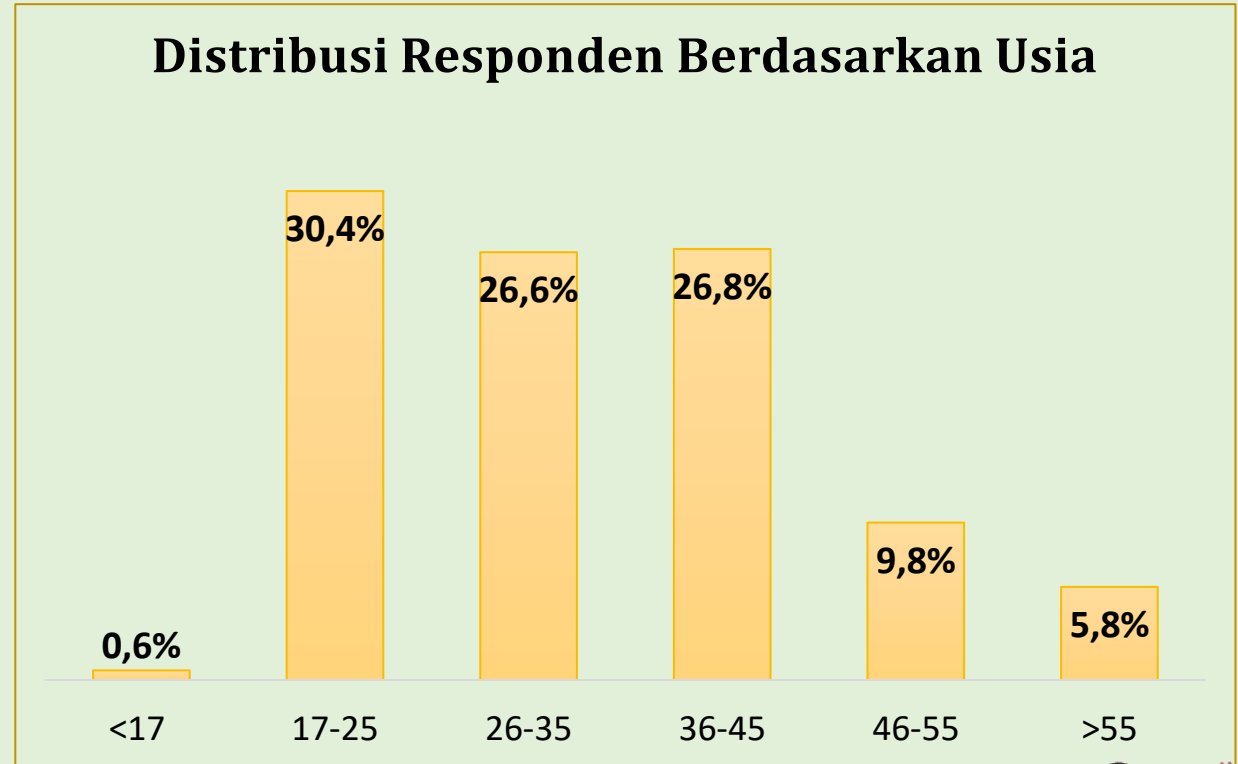
53%



47%

Dari 500 responden, 265 (53%) diantaranya berjenis kelamin laki-laki, sedangkan sisanya 235 (47%) berjenis kelamin perempuan

Distribusi Responden Berdasarkan Usia

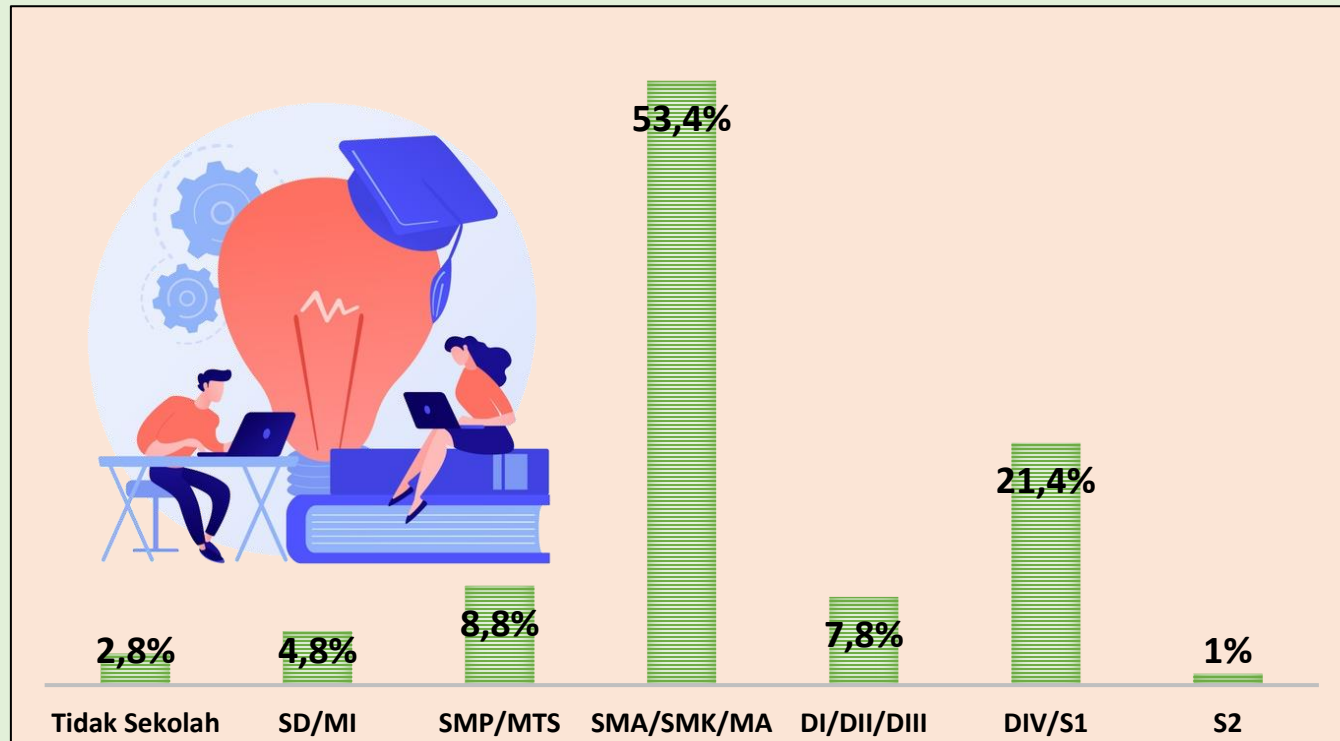


Responden survei didominasi oleh responden yang berusia **17-25 tahun** (152 responden atau 30,4%), **36-45 tahun** (134 responden atau 26,8%) dan **26-35 tahun** (133 responden atau 26,6%).



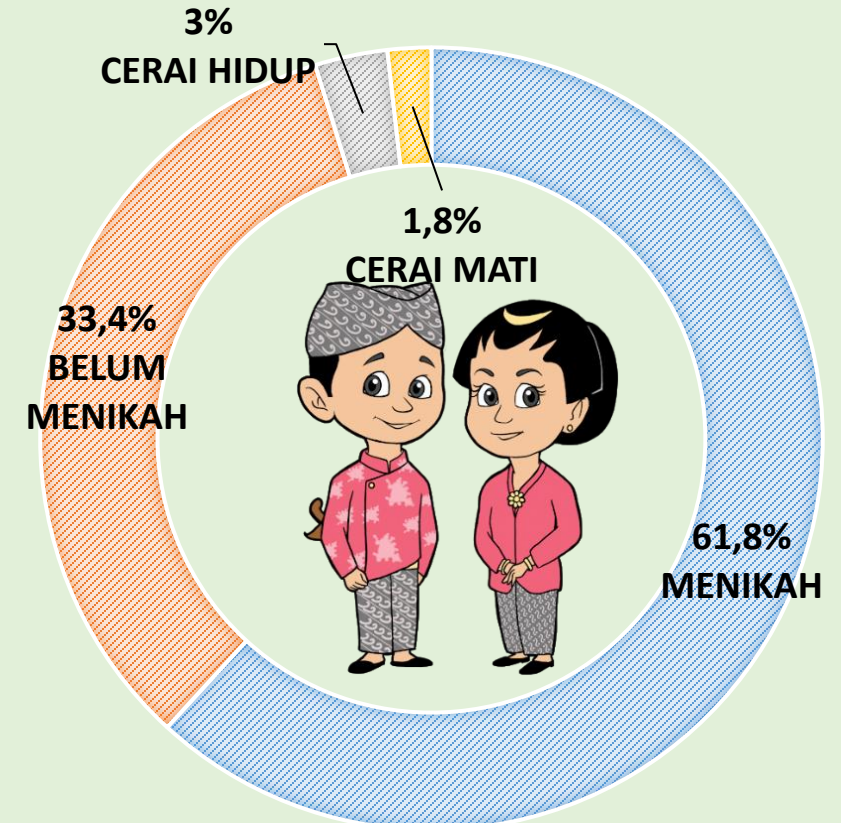
KARAKTERISTIK RESPONDEN

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan



Mayoritas responden survei berpendidikan SMA/SMK/MA, yakni sebanyak 267 responden (53,4%). Hanya ada 5 responden (1%) yang berpendidikan S2 dan tidak ada responden yang berpendidikan S3.

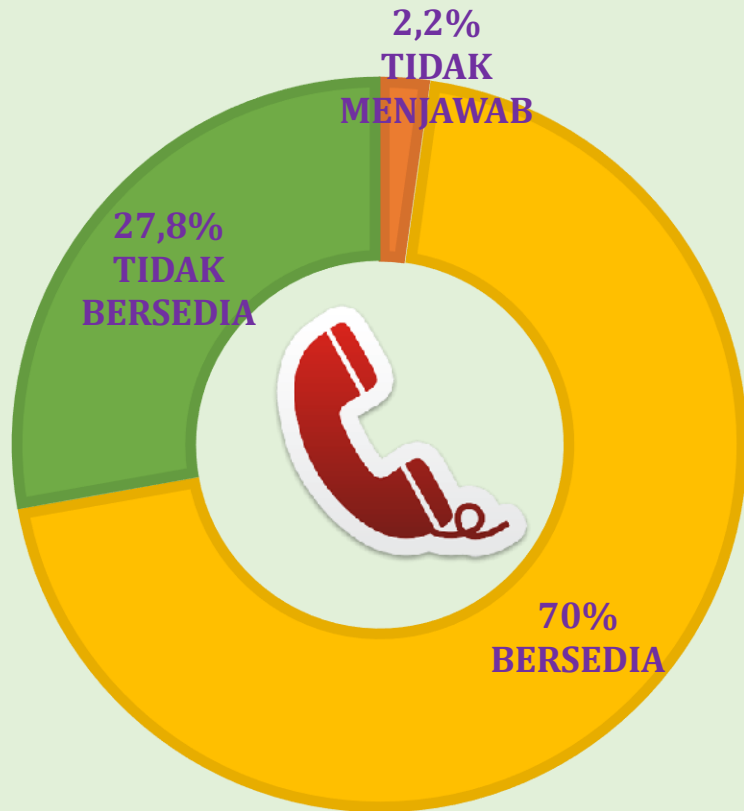
Distribusi Responden Berdasarkan Status Pernikahan



Mayoritas responden berstatus menikah yakni sebanyak 309 responden (61,8%) dan 9 responden (1,8%) yang cerai mati.

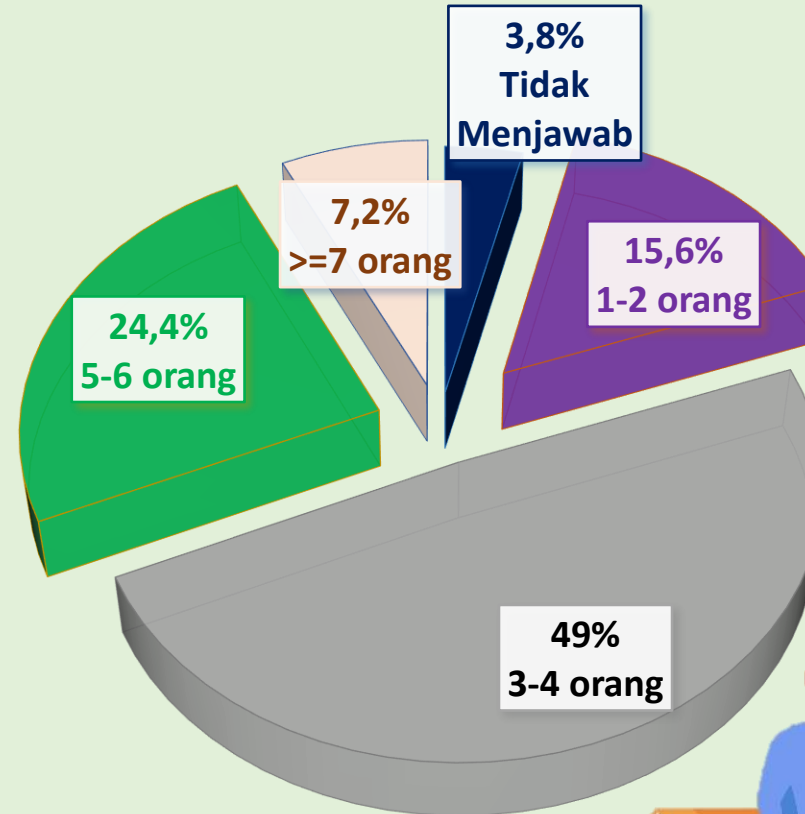
KARAKTERISTIK RESPONDEN

Distribusi Responden Berdasarkan Kesiediaan Dihubungi Kembali



Dari 500 responden, 350 (70%) diantaranya bersedia dihubungi kembali untuk menjawab survei lanjutan, 139 (27,8%) tidak bersedia dihubungi kembali, sedangkan sisanya 11 (2,2%) tidak memberikan jawaban.

Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anggota keluarganya



Mayoritas responden survei memiliki Jumlah Anggota Keluarga sebanyak 3-4 orang.



PERSEPSI DAN PERILAKU

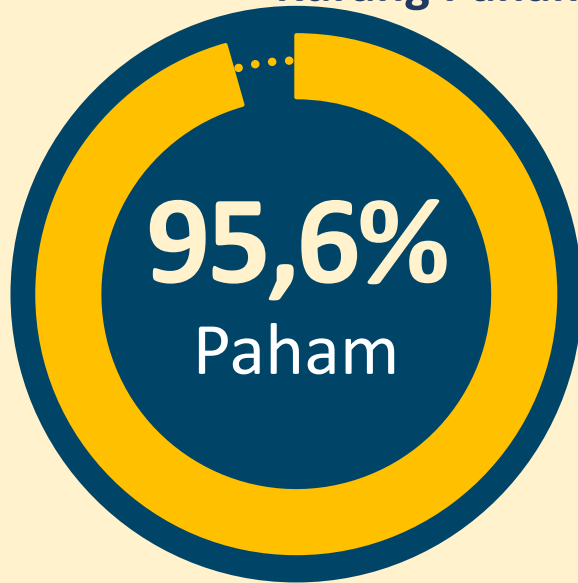


PERSEPSI DAN PERILAKU

Persepsi Responden Terhadap *New Normal Era*

4,4%

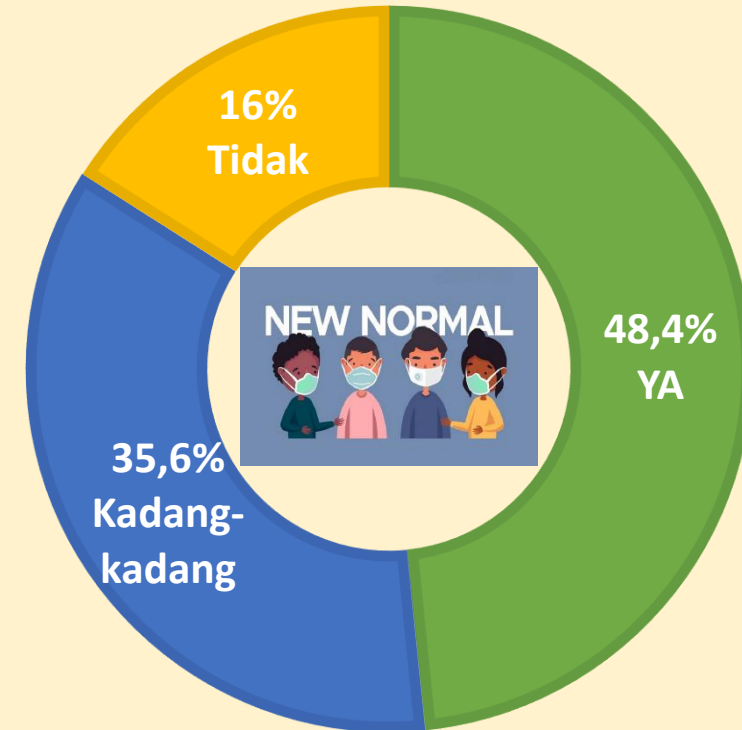
Kurang Paham



Secara umum, 96 dari setiap 100 penduduk Kota Bontang memahami kebijakan *new normal*.

Dari 500 responden, 478 (95,6%) diantaranya memahami kebijakan *new normal* (melakukan aktivitas seperti biasa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan), sedangkan sisanya 22 (4,4%) kurang memahami kebijakan *new normal*.

Persepsi Responden Terhadap Aktivasnya Saat *New Normal* Kembali Seperti Sebelum Pandemi

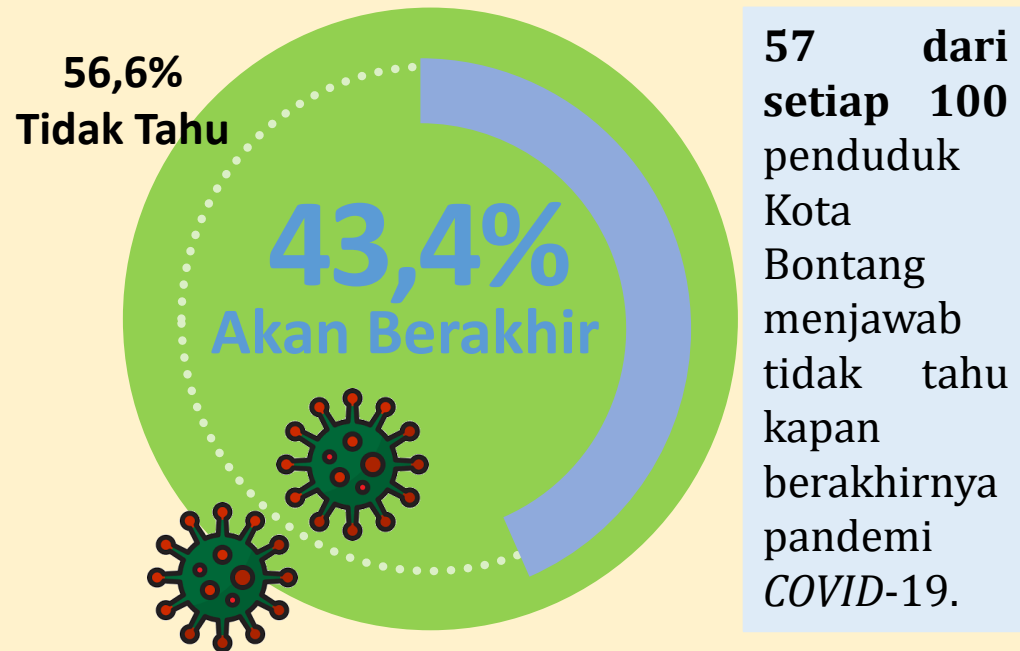


48 dari setiap 100 penduduk Kota Bontang melakukan aktivitas seperti biasa.

Saat kebijakan *new normal* diberlakukan, mayoritas responden yakni 242 responden (48,4%) melakukan aktivitasnya kembali seperti sebelum pandemi. Hanya 80 responden (16%) yang tidak melakukan aktivitasnya kembali seperti sebelum pandemi.

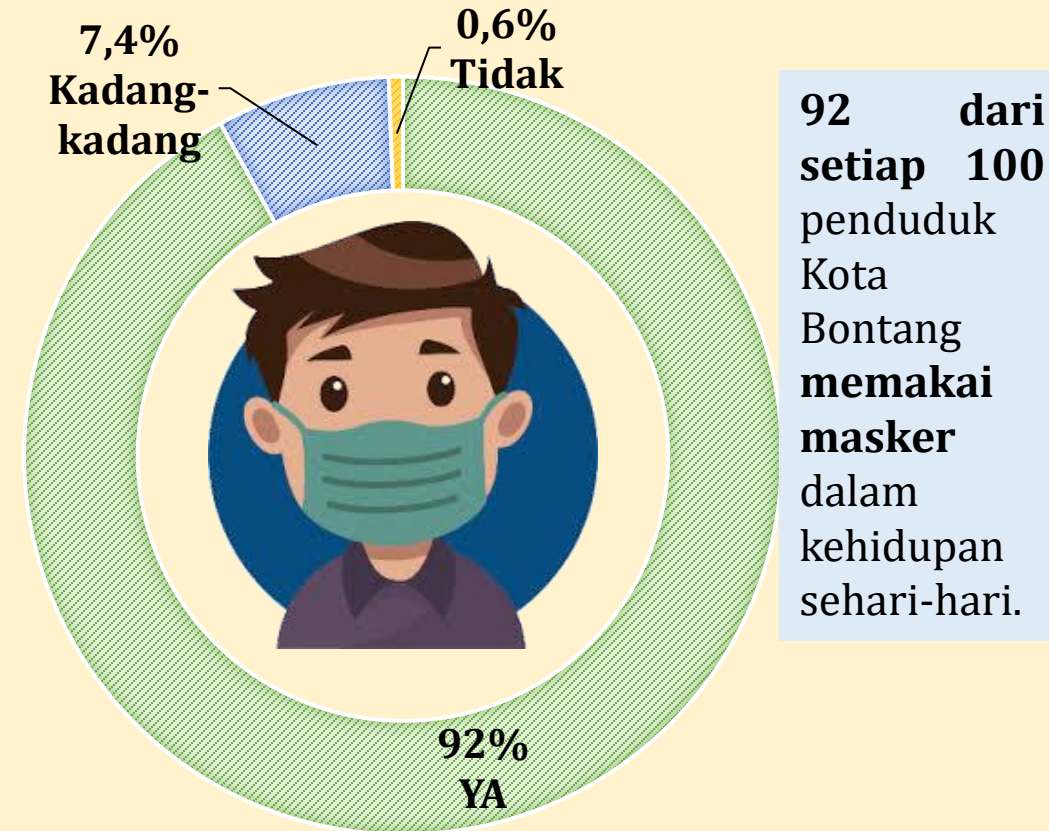
PERSEPSI DAN PERILAKU

Persepsi Responden Terhadap Berakhirnya Pandemi *COVID-19*



Dari 500 responden, hanya 217 responden (43,4%) yang menjawab bahwa pandemi *Covid-19* akan berakhir, sedangkan sisanya 283 (56,6%) menjawab tidak tahu apakah pandemi *Covid-19* ini akan berakhir.

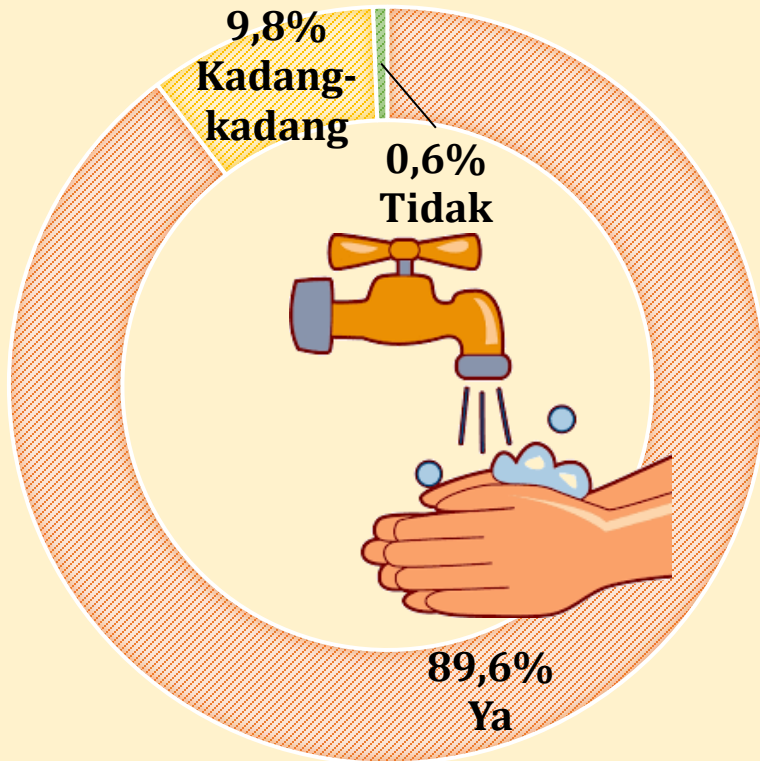
Penerapan Protokol Kesehatan “Menggunakan Masker” dalam Kehidupan Sehari-hari



Mayoritas responden survei menerapkan protokol kesehatan (**memakai masker**) dalam kehidupan sehari-hari yakni sebanyak 460 responden (92%).

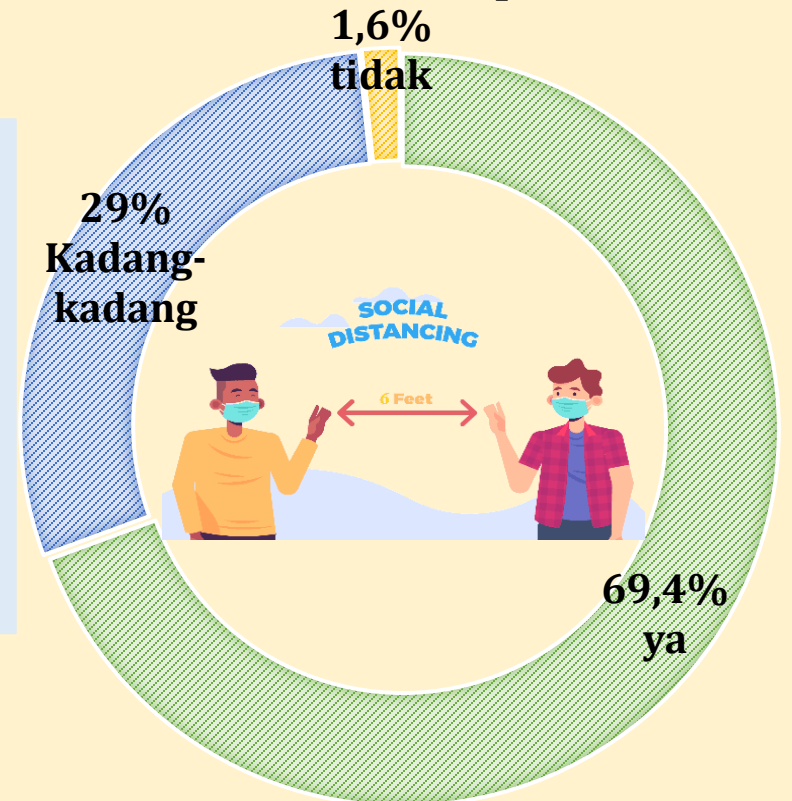
PERSEPSI DAN PERILAKU

Penerapan Protokol Kesehatan "Mencuci Tangan" dalam Kehidupan Sehari-hari



90 dari setiap 100 penduduk Kota Bontang mencuci tangan dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan Protokol Kesehatan "Menjaga Jarak" dalam Kehidupan Sehari-hari



69 dari setiap 100 penduduk Kota Bontang menjaga jarak dalam kehidupan sehari-hari.

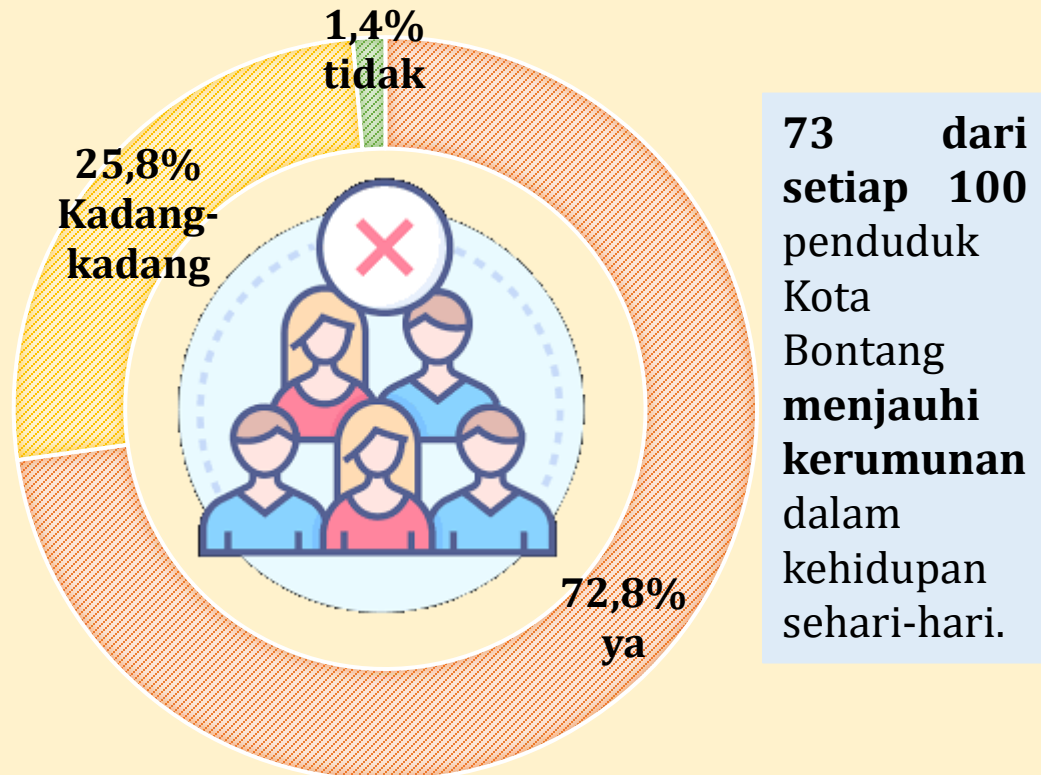
Mayoritas responden survei menerapkan protokol kesehatan (**Mencuci Tangan**) dalam kehidupan sehari-hari yakni sebanyak 448 responden (89,6%).

Mayoritas responden survei menerapkan protokol kesehatan (**Menjaga Jarak**) dalam kehidupan sehari-hari yakni sebanyak 347 responden (69,4%).

PERSEPSI DAN PERILAKU

Penerapan Protokol Kesehatan

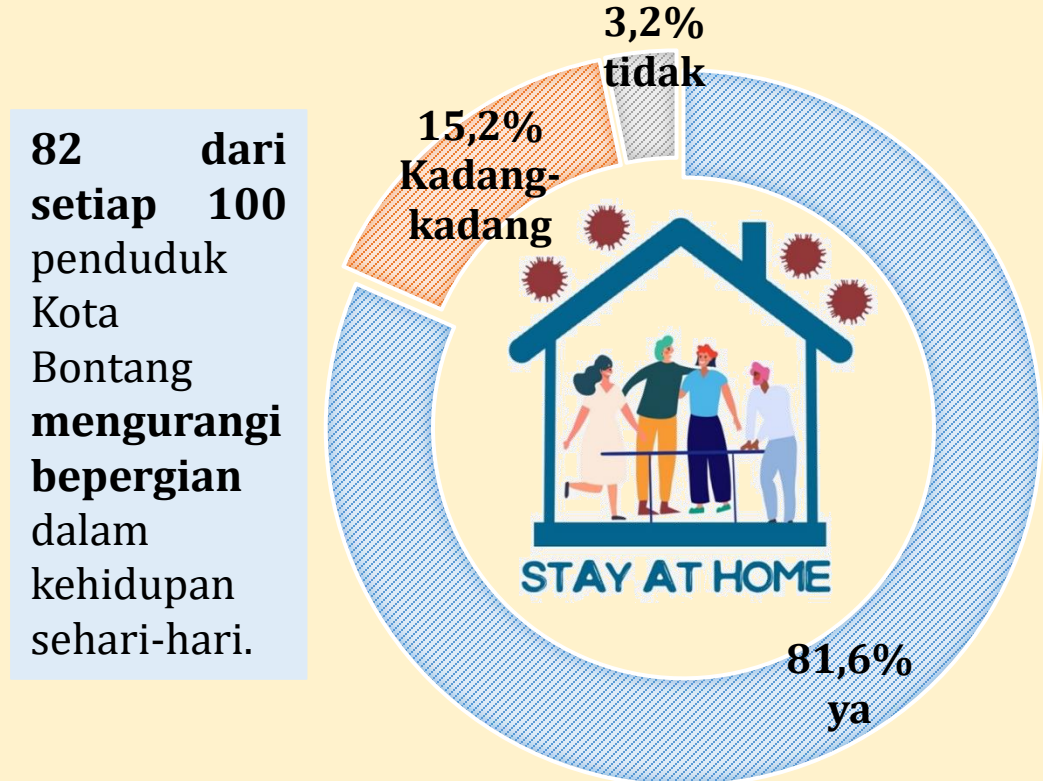
“Menjauhi Kerumunan” dalam Kehidupan Sehari-hari



Mayoritas responden survei menerapkan protokol kesehatan (**Menjauhi Kerumunan**) dalam kehidupan sehari-hari yakni sebanyak 364 responden (72,8%).

Penerapan Protokol Kesehatan

“Mengurangi Bepergian/Mobilitas” dalam Kehidupan Sehari-hari



Mayoritas responden survei menerapkan protokol kesehatan (**Mengurangi Bepergian/Mobilitas**) dalam kehidupan sehari-hari yakni sebanyak 408 responden (81,6%).

PERSEPSI DAN PERILAKU

Protokol kesehatan yang mudah diterapkan
Responden dalam kehidupan sehari-hari.

Protokol kesehatan	Frekuensi
Masker	471
Mencuci Tangan	386
Menjaga jarak	185
Menjauhi Kerumunan	164
Mengurangi Mobilitas	213

**Jawaban boleh lebih dari satu*

Mayoritas responden survei menjawab bahwa penerapan protokol kesehatan yang **mudah** dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah memakai masker dan mencuci tangan.

Protokol kesehatan yang sulit diterapkan
Responden dalam kehidupan sehari-hari.

Protokol kesehatan	Frekuensi
Masker	18
Mencuci Tangan	20
Menjaga jarak	234
Menjauhi Kerumunan	202
Mengurangi Mobilitas	141

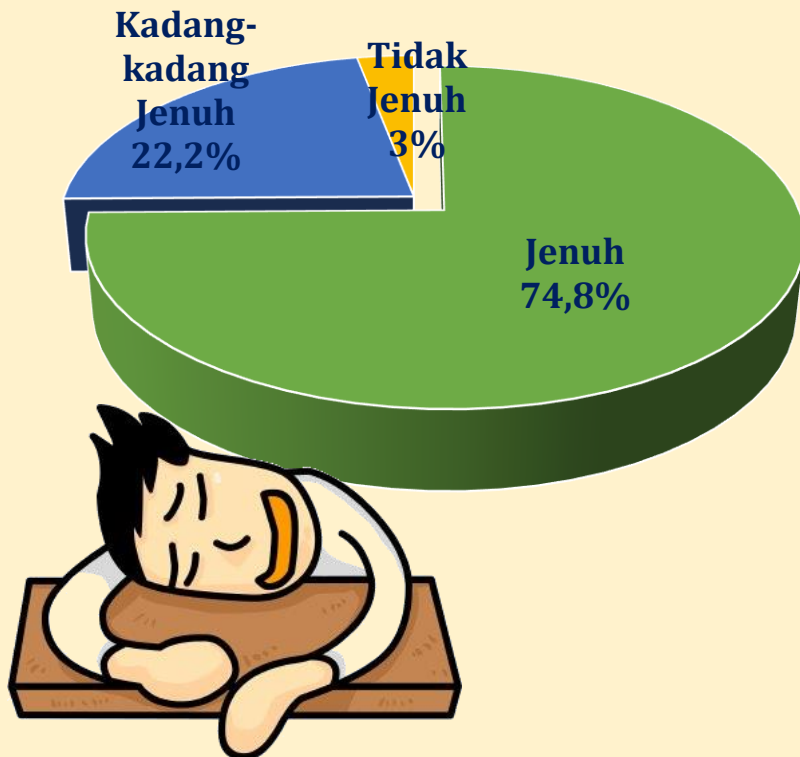
**Jawaban boleh lebih dari satu*

Mayoritas responden survei menjawab bahwa penerapan protokol kesehatan yang **sulit** dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah Menjaga jarak dan Menjauhi Kerumunan.



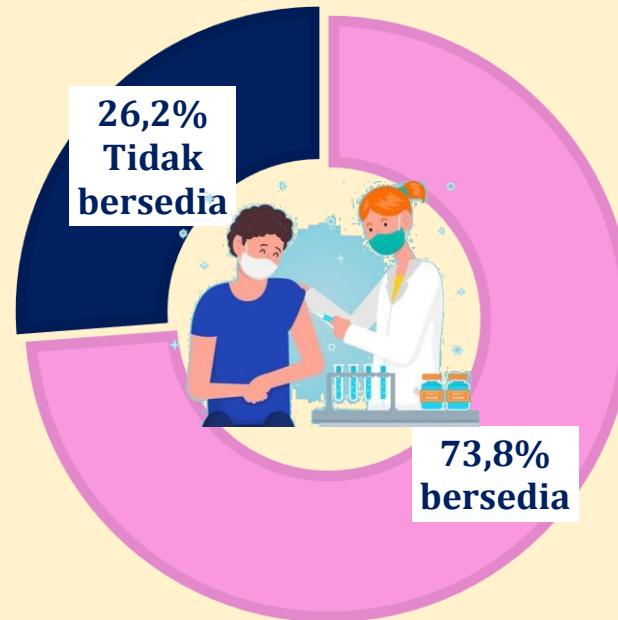
PERSEPSI DAN PERILAKU

Perasaan Responden terhadap Kondisi Pandemi *COVID-19*



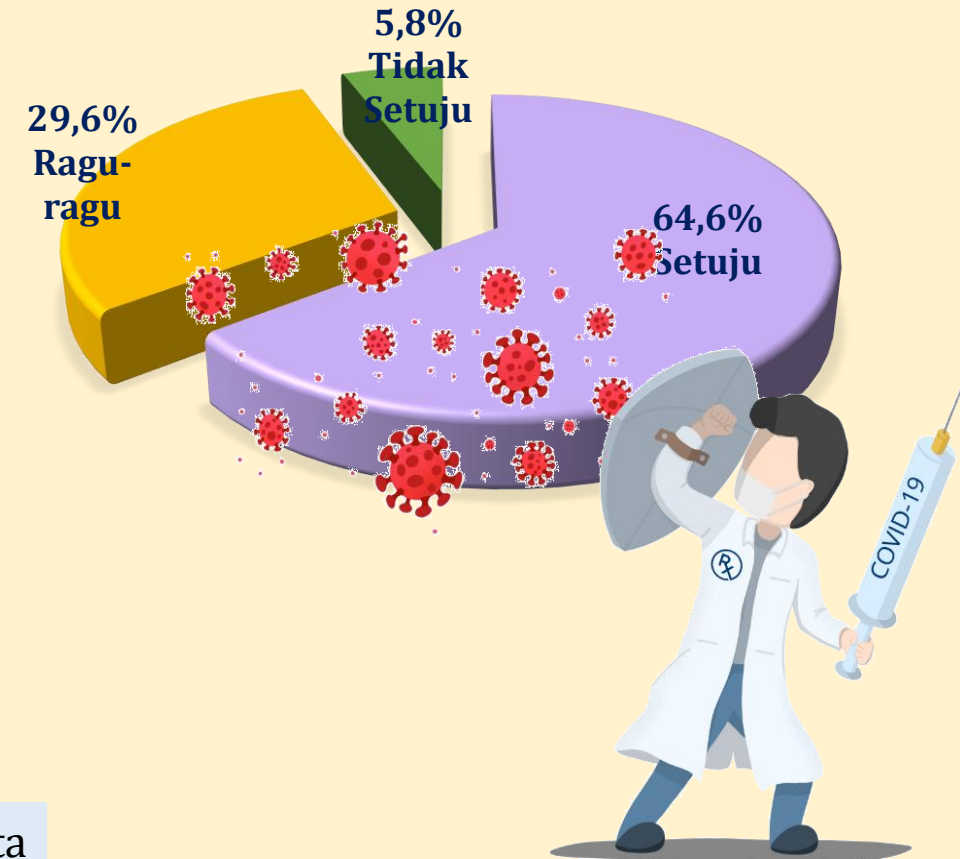
75 dari setiap 100 penduduk Kota Bontang merasa **jenuh** terhadap kondisi pandemi *COVID-19*.

Kesediaan Responden untuk Divaksin



74 dari setiap 100 penduduk Kota Bontang **bersedia** divaksin.

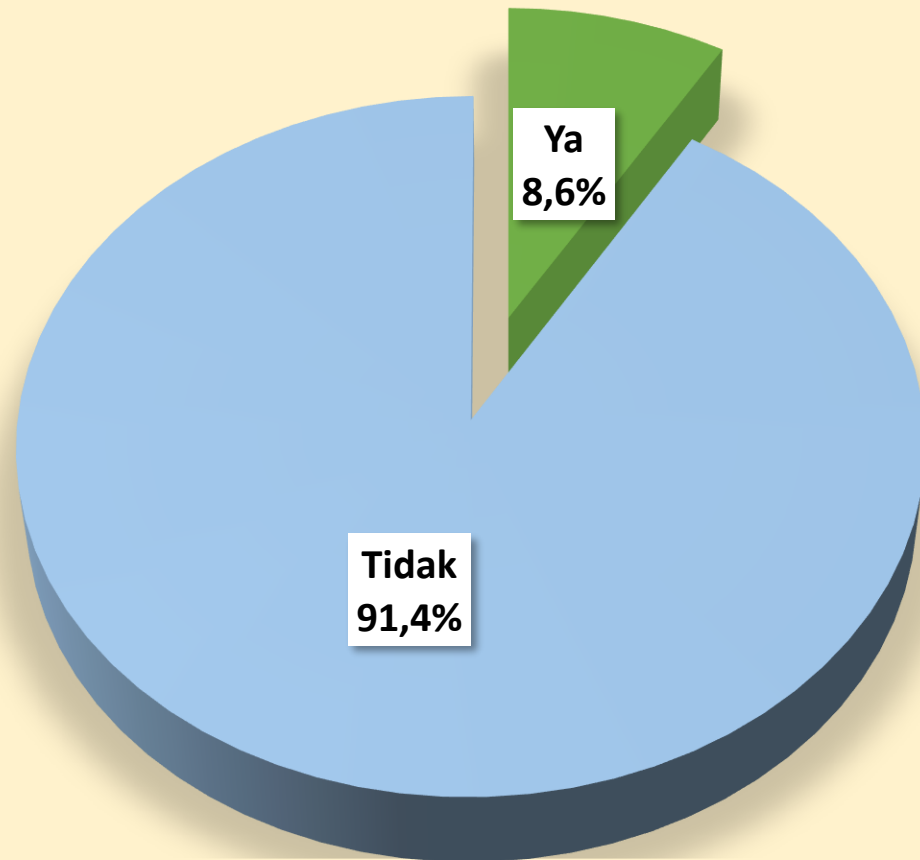
Sikap Responden Terhadap Program Vaksin *COVID-19*



65 dari setiap 100 penduduk Kota Bontang **setuju** program vaksin.

PERSEPSI DAN PERILAKU

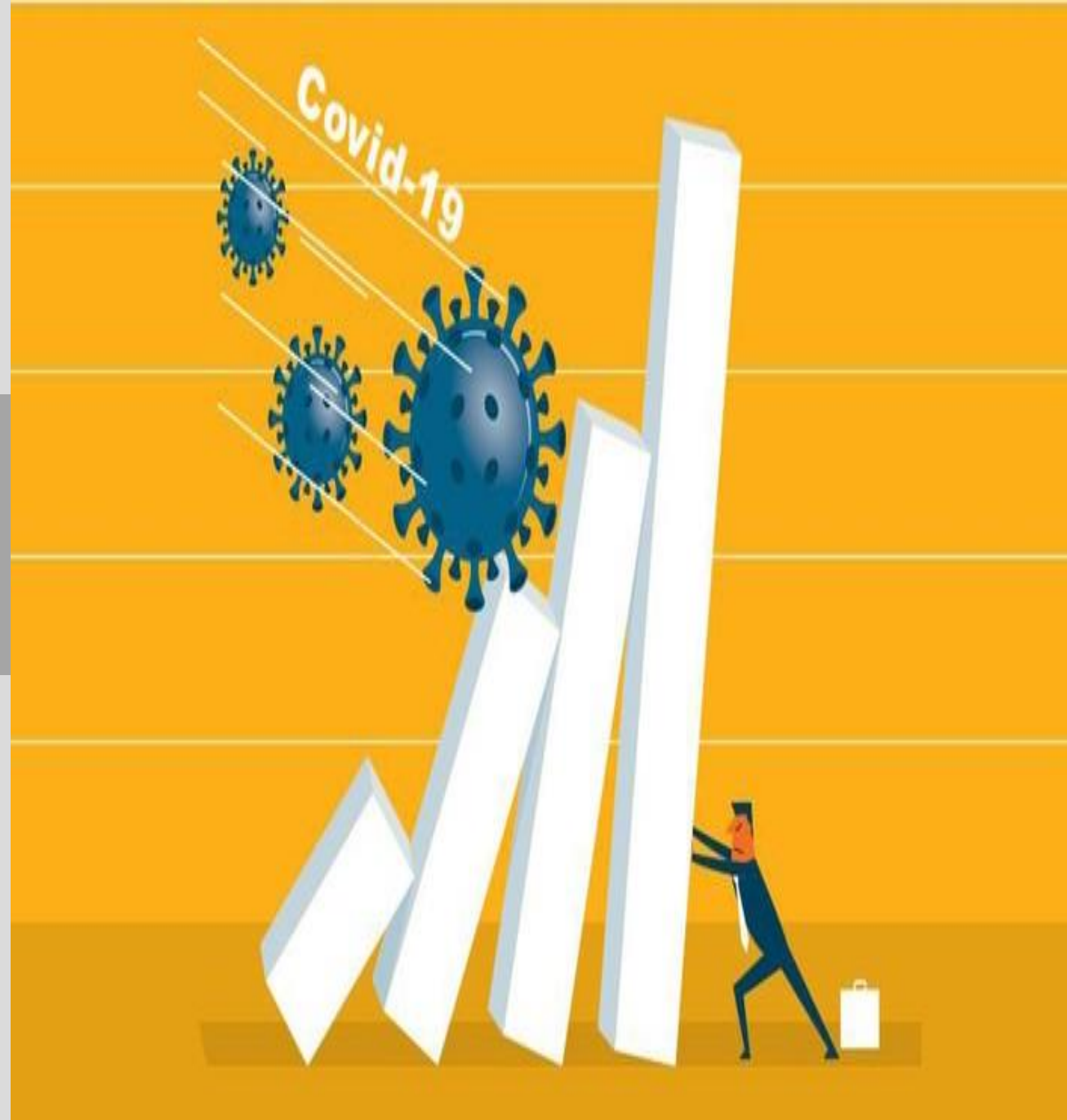
Riwayat Terinfeksi COVID-19



Dari 500 responden, 43 responden (8,6%) diantaranya pernah terinfeksi COVID-19 sedangkan 457 responden (91,4%) tidak ada riwayat terinfeksi COVID-19.

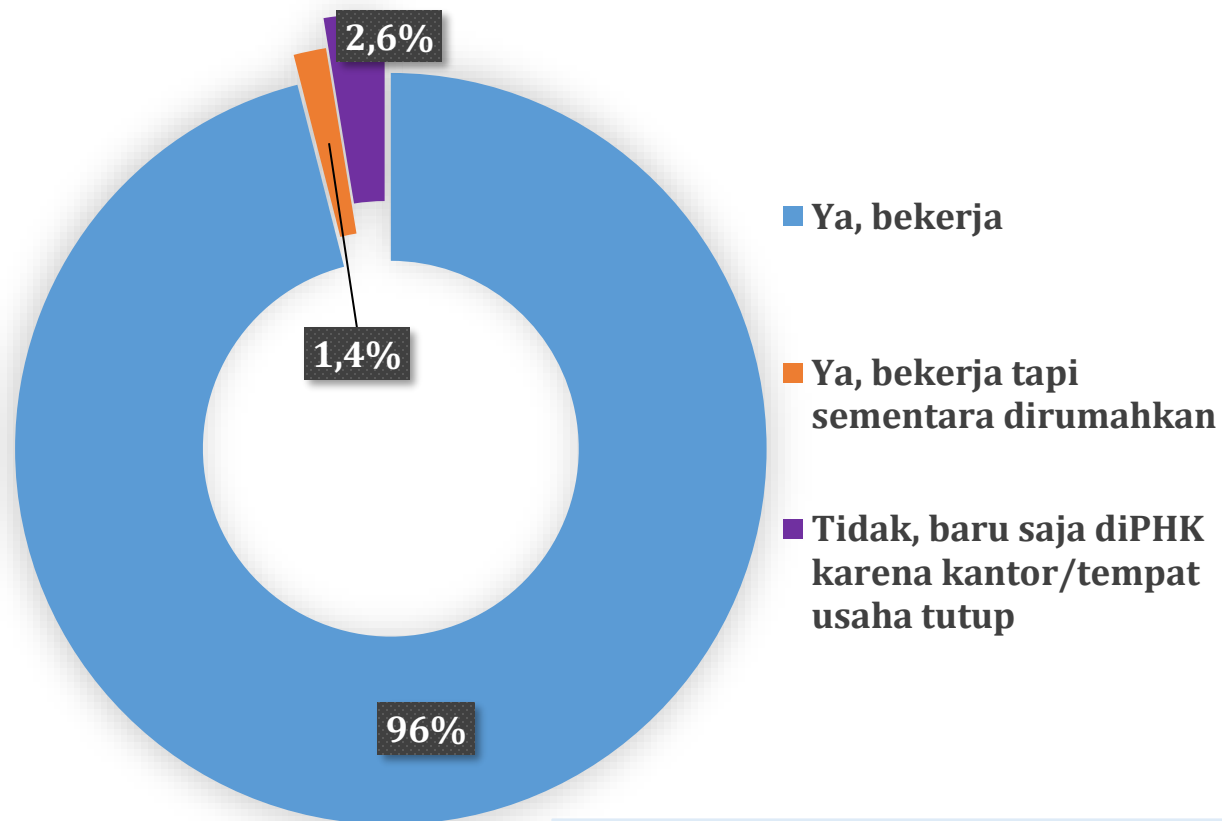


DAMPAK EKONOMI



DAMPAK EKONOMI

Status Pekerjaan Responden Sejak 2020 Sampai Sekarang



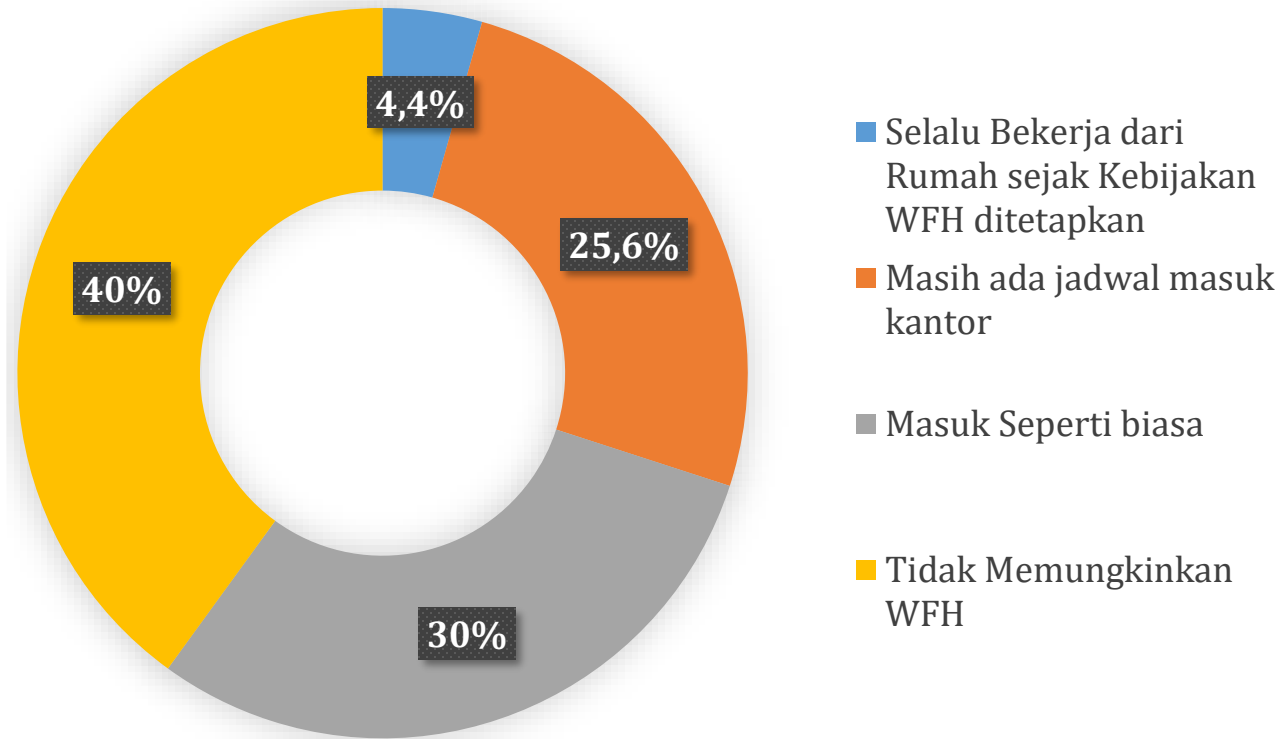
96 dari setiap 100 penduduk Kota Bontang masih bekerja.

Dari 500 responden, terdapat 480 responden (96%) yang masih bekerja dan 7 responden (1,4%) yang bekerja tapi sementara dirumahkan.



DAMPAK EKONOMI

Kebijakan Penerapan Bekerja dari Rumah (*Work From Home* /WFH)



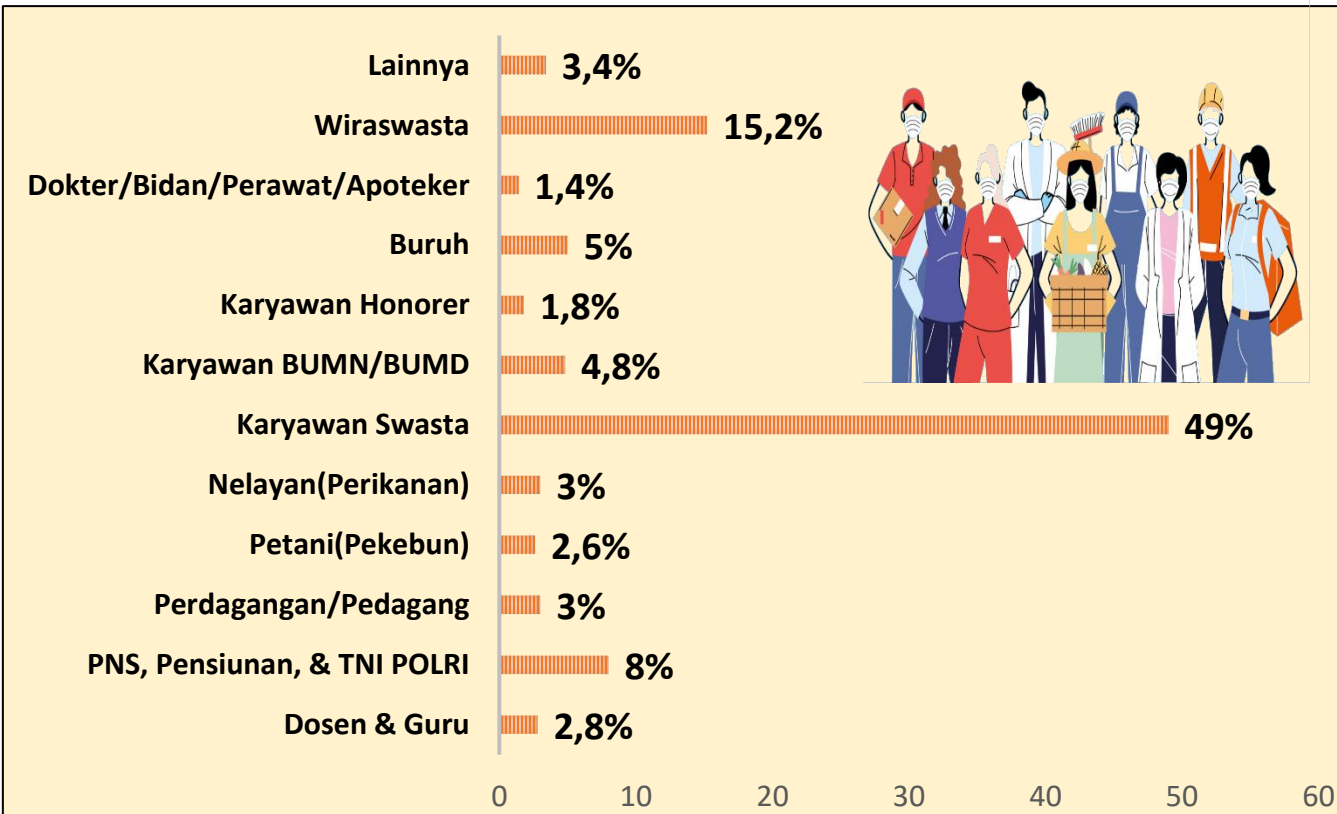
40 dari setiap 100 penduduk Kota Bontang yang pekerjaannya tidak memungkinkan WFH

Dari 500 responden, terdapat 200 responden (40%) yang **pekerjaannya tidak memungkinkan WFH** dan 22 responden (4,4%) yang selalu bekerja dari rumah sejak kebijakan WFH.



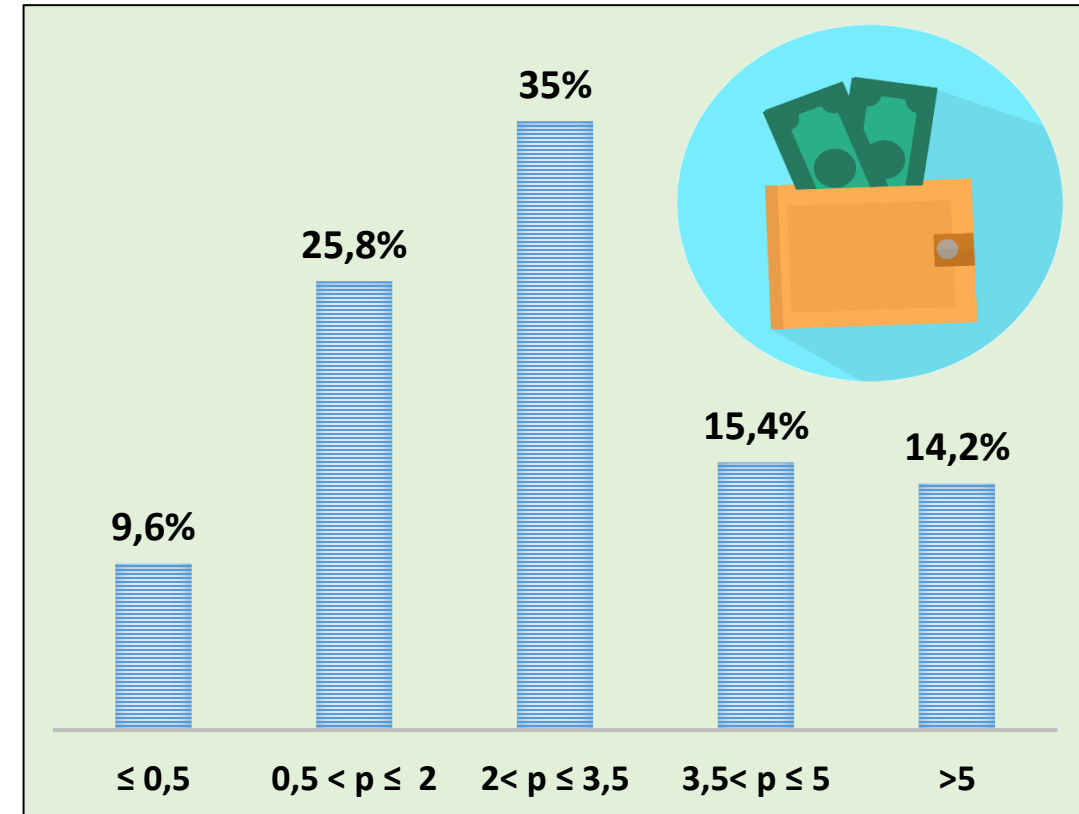
DAMPAK EKONOMI

Bidang Pekerjaan Responden



Dari 500 responden, terdapat **245 responden (49%) karyawan swasta** dan 7 responden (1,4%) tenaga Kesehatan (Dokter/Bidan/Perawat/Apoteker).

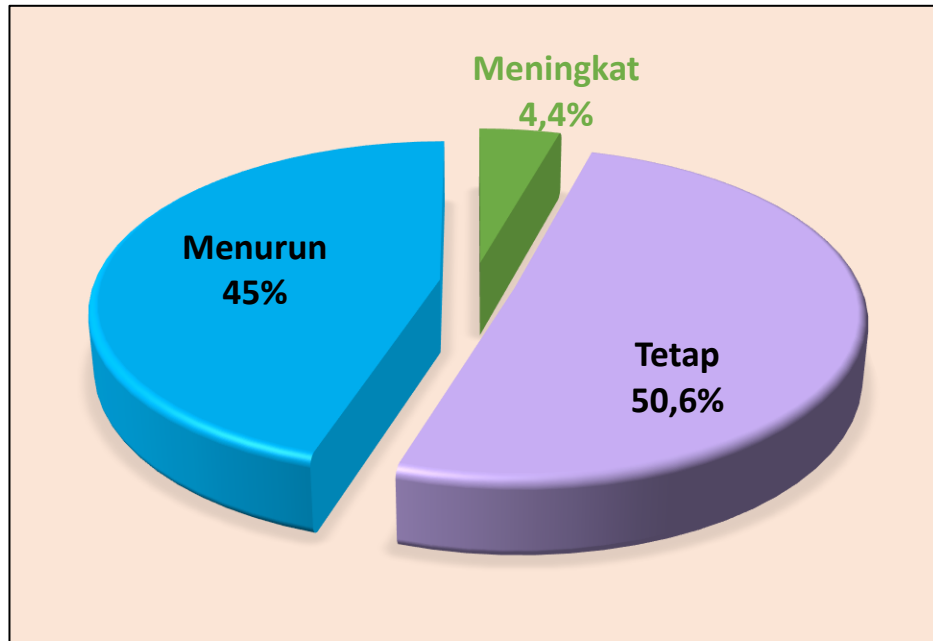
Pendapatan (Juta Rupiah) Bulanan Responden



Dari 500 responden, terdapat **175 responden (35%) dengan pendapatan antara 2 juta sampai 3,5 juta** dan 48 responden (9,6%) dengan pendapatan kurang dari atau sama dengan 0,5 juta.

DAMPAK EKONOMI

Dampak Pandemi terhadap Pendapatan Responden



Dari 500 responden, terdapat 22 responden (4,4%) dengan pendapatan meningkat, **225 responden (45%) dengan pendapatan menurun**, dan 253 responden (50,6%) dengan pendapatan tetap.

Alasan meningkat:

1. Adanya insentif TIM COVID 19.
2. Banyak yang tidak mematuhi aturan/protokol kesehatan

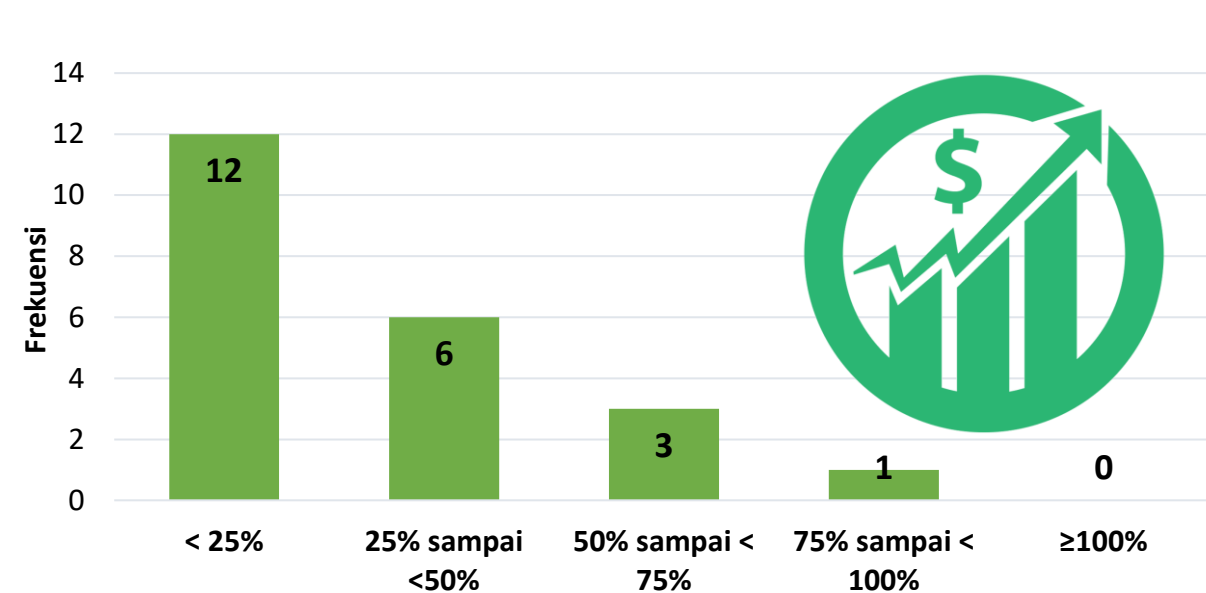
Alasan menurun:

1. Cari kerja susah.
2. Banyak jalan yang ditutup sehingga penjualan seles menurun.
3. Toko semakin sepi
4. Orang lebih banyak memilih di rumah
5. Kena PHK, susah cari kerja
6. Lebih banyak yang mematuhi protokol Kesehatan
7. Tidak ada komisi.
8. Beberapa tunjangan dihapus, UMK tidak naik.
9. Berkurangnya kerumunan.
10. Takut keluar.
11. Banyak kegiatan tidak bisa *offline*.
12. Anak sekolah BDR.
13. Cuaca jelek.
14. Usaha kebun tutup.
15. Pekerjaan dan jam kerja dibatasi.
16. Jarang masuk kerja.
17. Kurang orang mancing.
18. Jarang menerima orderan.
19. Kurang orang menjahit.
20. Masyarakat mencuci sendiri dirumah, sehingga usaha laundry sepi.
21. Kurangnya partisipasi orang tua membayar SPP (Pekerjaan: PNS)
22. Ternak tidak laku.



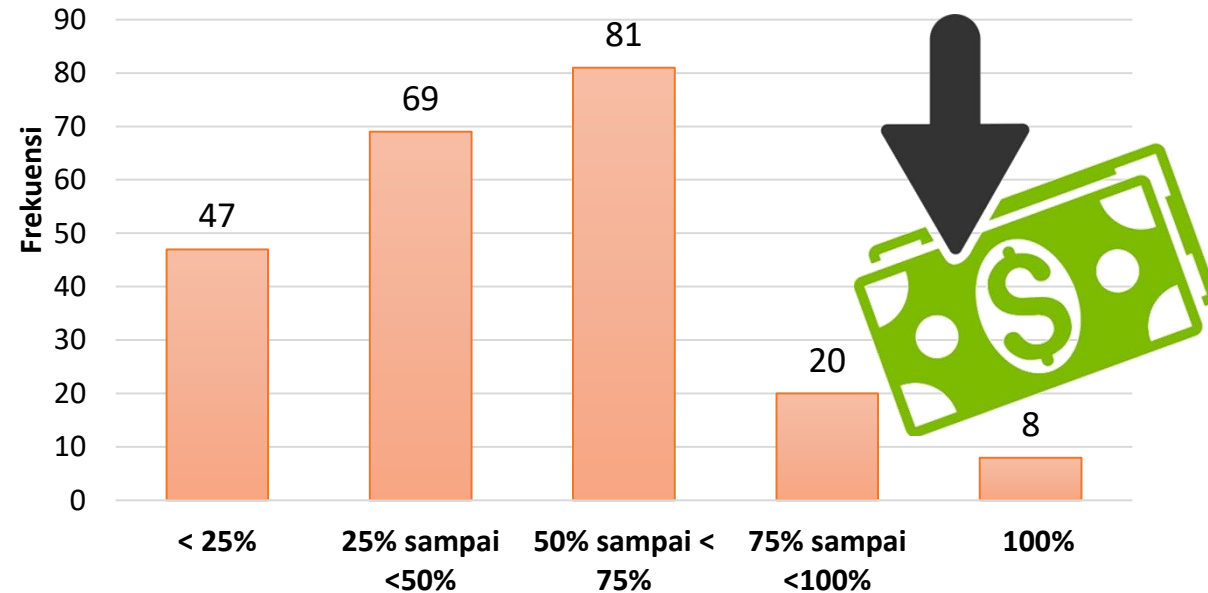
DAMPAK EKONOMI

Persentase (%) Peningkatan Pendapatan Responden



Dari 22 responden yang mengalami peningkatan pendapatan, **paling banyak mengalami peningkatan pendapatan kurang dari 25%**, hanya 1 responden yang peningkatannya 75% sampai kurang dari 100% dan tidak ada responden yang peningkatan pendapatannya mencapai 100% atau lebih.

Persentase (%) Penurunan Pendapatan Responden

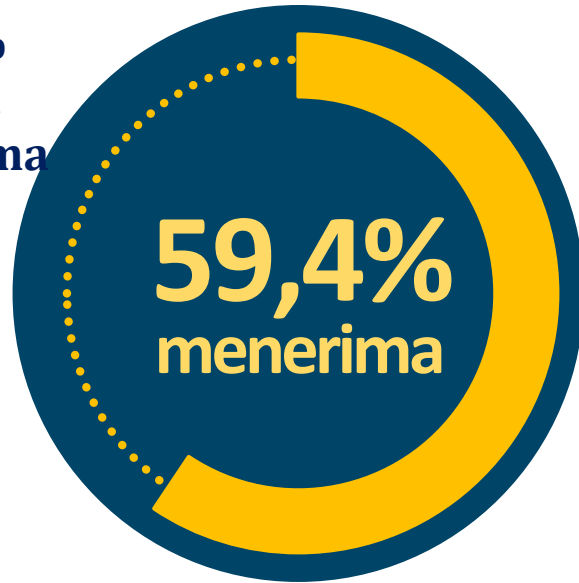


Dari 225 responden yang mengalami penurunan pendapatan, **paling banyak (81 responden) mengalami penurunan pendapatan antara 50% sampai kurang dari 75%**, kemudian 69 responden mengalami penurunan 25% sampai kurang dari 50% dan terdapat 8 responden yang mengalami penurunan pendapatan 100%.

DAMPAK EKONOMI

Status Penerima Bantuan Sosial Responden Selama pandemi COVID-19

40,6%
Tidak
menerima



Dari 500 responden, terdapat **297 responden (59,4%) yang pernah menerima bantuan sosial** dari pemerintah ataupun perusahaan dan 203 responden (40,6%) yang tidak pernah menerima bantuan.

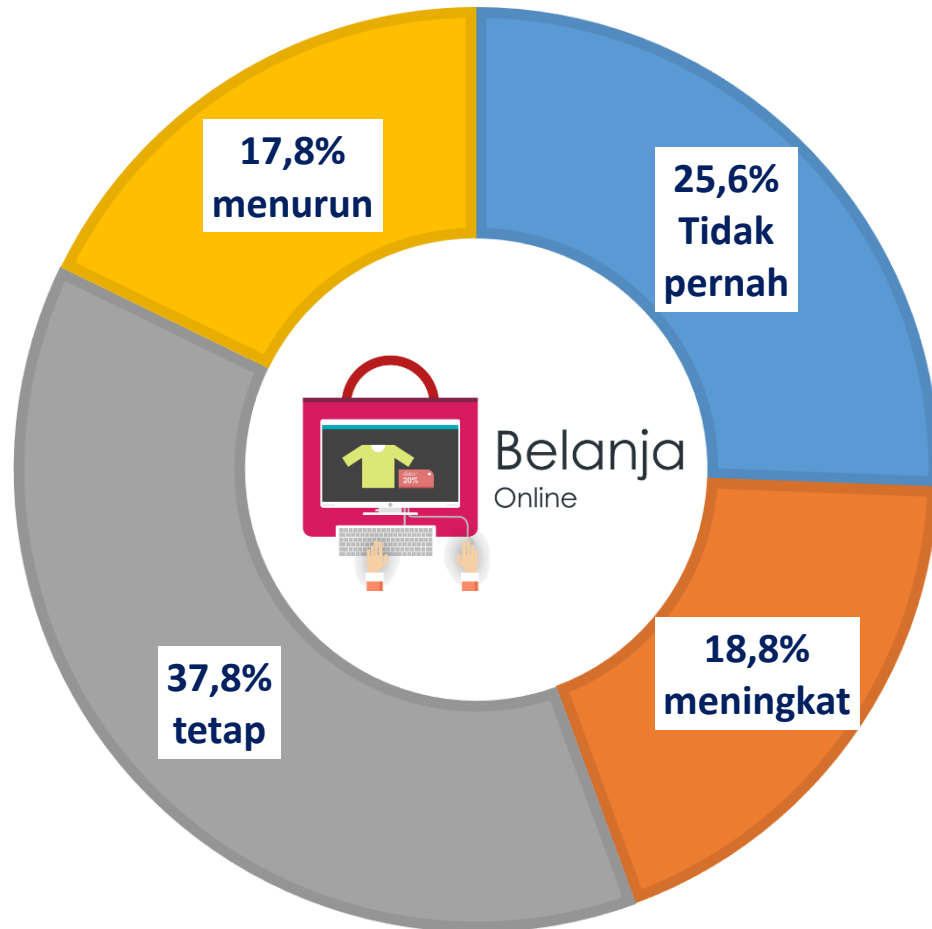
Jenis Bantuan yang Diterima

Jenis Bantuan	Frekuensi
Bantuan Sembako	128
Bantuan Sosial Tunai	21
Bantuan Langsung Tunai (BLT)	91
Subsidi Listrik	13
Kartu Prakerja	28
Subsidi Gaji Karyawan	24
BLT usaha mikro kecil	26
CSR dari Perusahaan : PKT, PLN	8
Lainnya (Masker, Subsidi PDAM, BPJS Ketenagakerjaan, Bantuan Vitamin, PKH)	17



DAMPAK EKONOMI

Aktivitas belanja *online* Responden sejak ada pandemi *COVID-19*

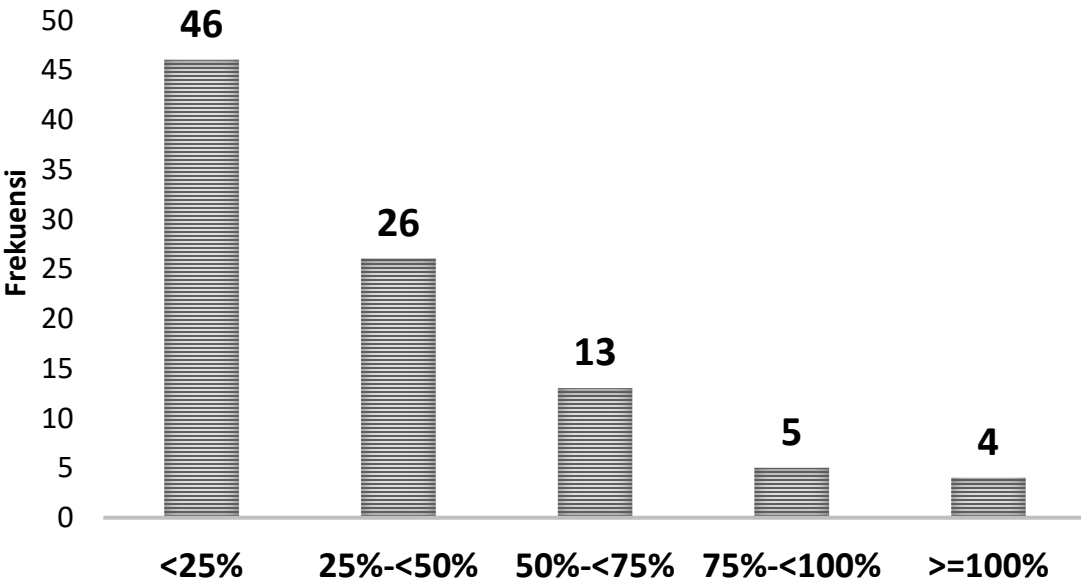


Dari 500 responden, terdapat 128 responden (25,6%) yang tidak pernah belanja online. **Aktivitas belanja online yang meningkat sebanyak 94 responden (18,8%)** dan yang menurun sebanyak 89 responden (17,8%).



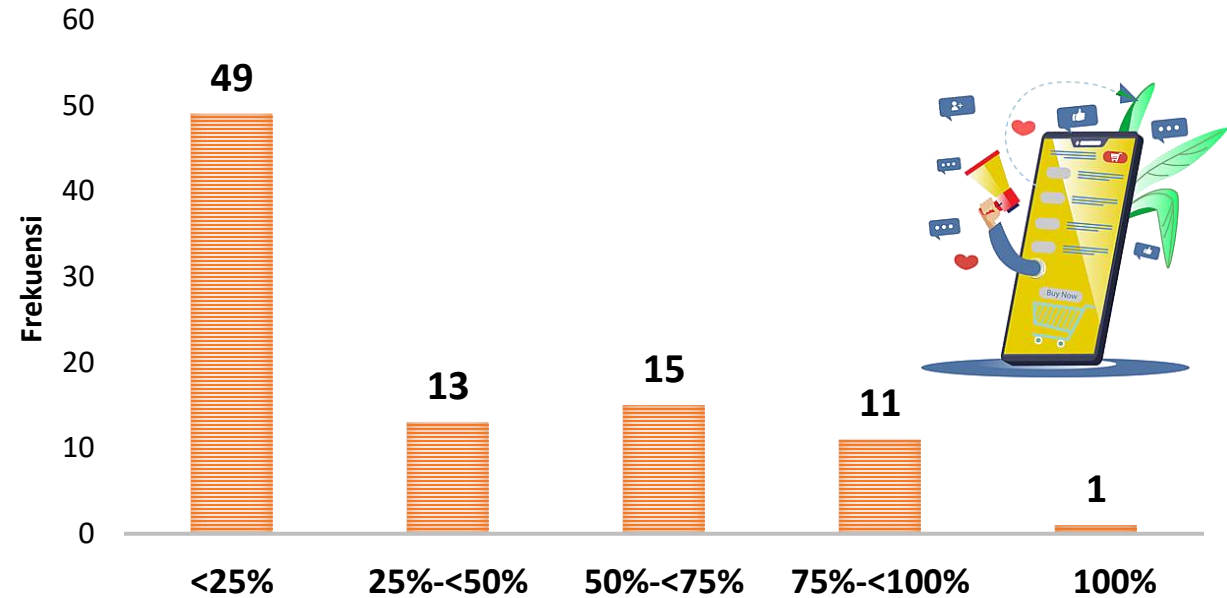
DAMPAK EKONOMI

Persentase Peningkatan belanja *online* Responden dibanding biasanya



Dari 94 responden yang mengalami peningkatan belanja online, terdapat 46 responden dengan peningkatan belanja online kurang dari 25% dan 4 responden dengan peningkatan belanja online 100% atau lebih.

Persentase Penurunan belanja *online* Responden dibanding biasanya

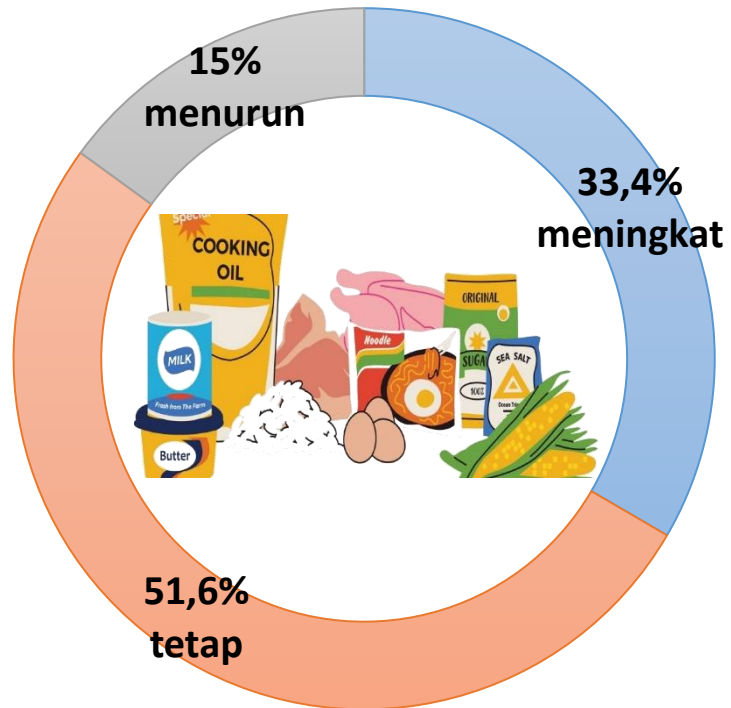


Dari 89 responden yang mengalami penurunan belanja online, terdapat 49 responden dengan penurunan belanja online kurang dari 25% dan 1 responden dengan penurunan belanja online 100%.



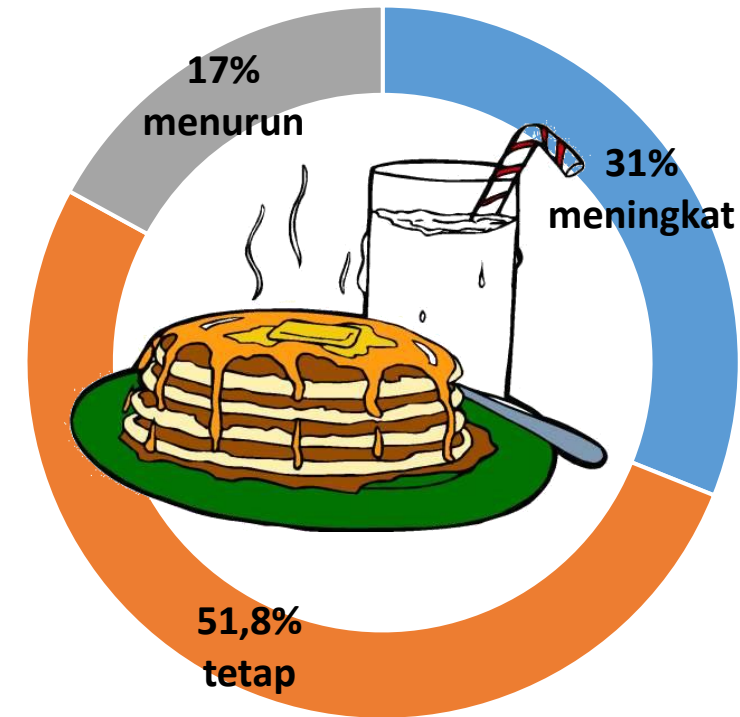
DAMPAK EKONOMI

Perubahan pengeluaran Responden untuk bahan makanan (sembako, sayuran, lauk mentah) selama pandemi



Dari 500 responden, terdapat **167 responden (33,4%)** dengan pengeluaran yang meningkat untuk bahan makanan (sembako, sayuran, lauk mentah) selama pandemi, 75 responden (15%) yang menurun dan 258 responden tetap (51,6%).

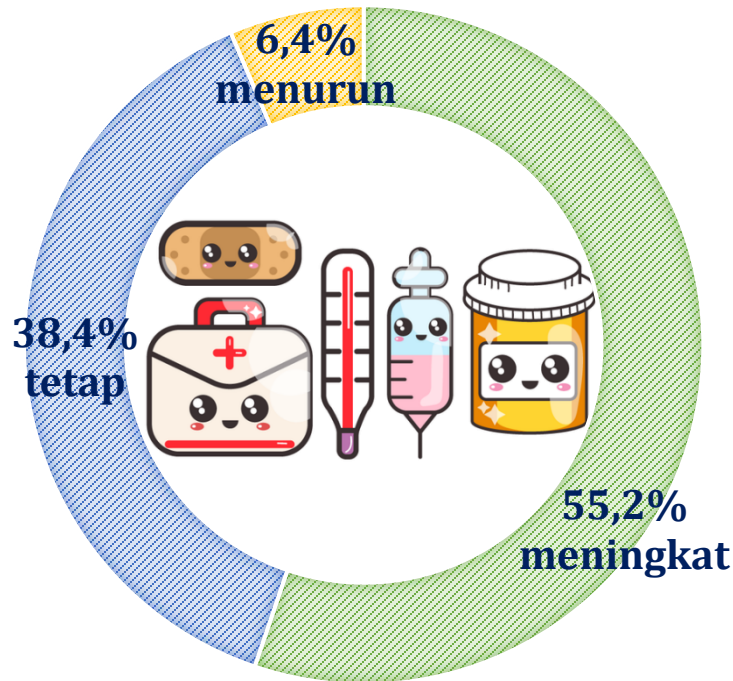
Perubahan pengeluaran Responden untuk makanan/minuman jadi selama pandemi



Dari 500 responden, terdapat **55 responden (31%)** dengan pengeluaran yang meningkat untuk makanan/minuman jadi selama pandemi, 85 responden (17%) yang menurun dan 260 responden tetap (51,8%).

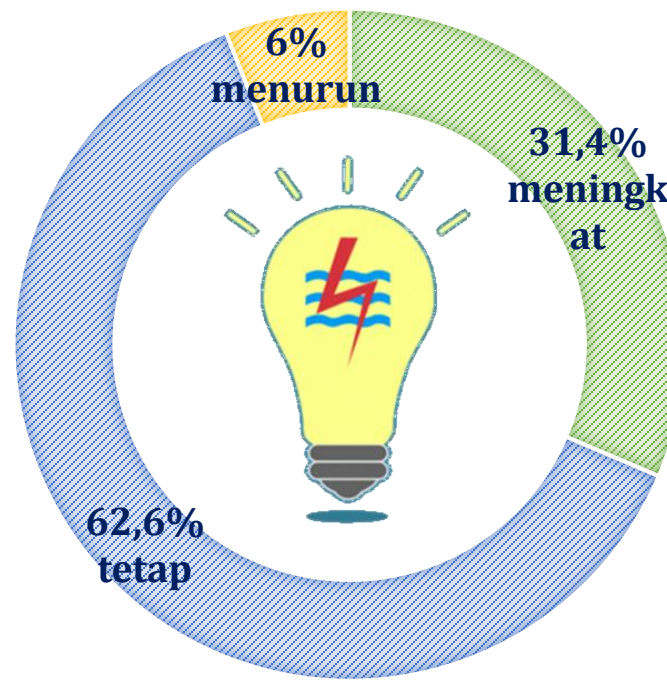
DAMPAK EKONOMI

Perubahan pengeluaran Responden untuk kesehatan (obat, vitamin, dan sanitasi) selama pandemi



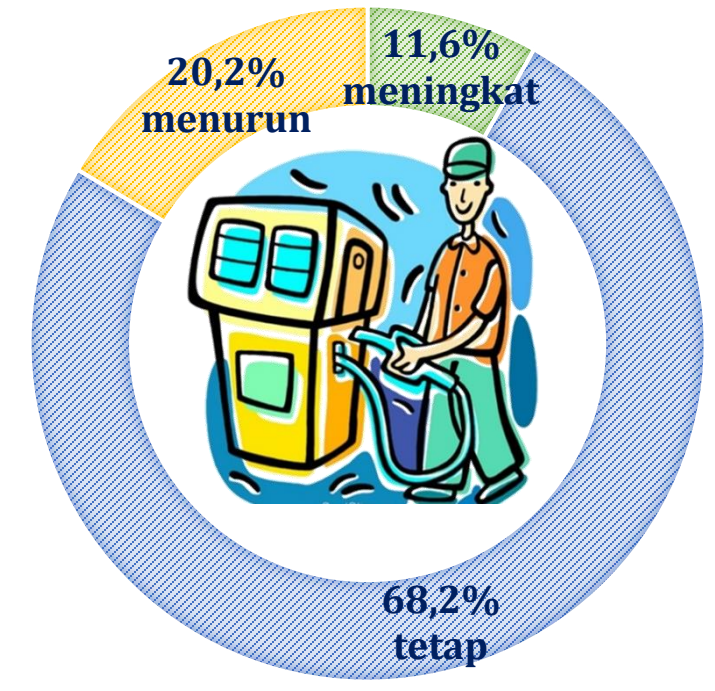
Dari 500 responden, terdapat 276 responden (55,2%) dengan pengeluaran yang meningkat untuk kesehatan (obat, vitamin, dan sanitasi) selama pandemi, 32 responden (6,4%) yang menurun dan 192 responden tetap (38,4%).

Perubahan Pengeluaran Responden untuk listrik selama pandemi



Dari 500 responden, terdapat 157 responden (31,4%) dengan pengeluaran yang meningkat untuk listrik selama pandemi, 30 responden (6%) yang menurun dan 313 responden tetap (62,6%).

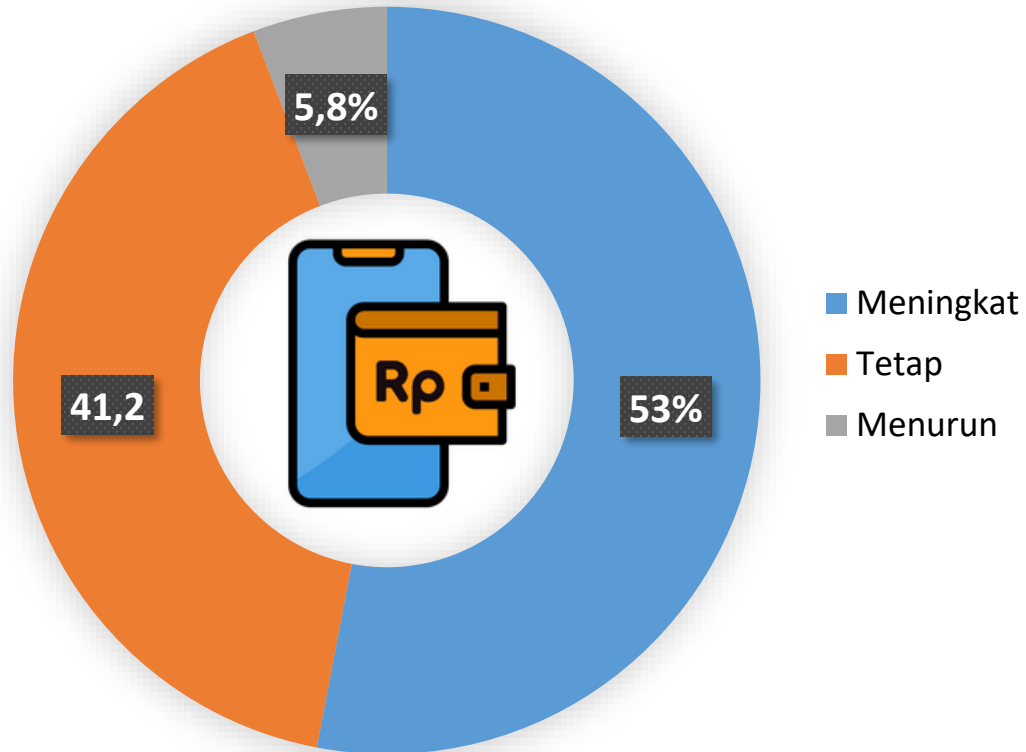
Perubahan Pengeluaran Responden untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) selama pandemi



Dari 500 responden, terdapat 58 responden (11,6%) dengan pengeluaran yang meningkat untuk bahan bakar minyak selama pandemi, 101 responden (20,2%) yang menurun dan 341 responden tetap (68,2%).

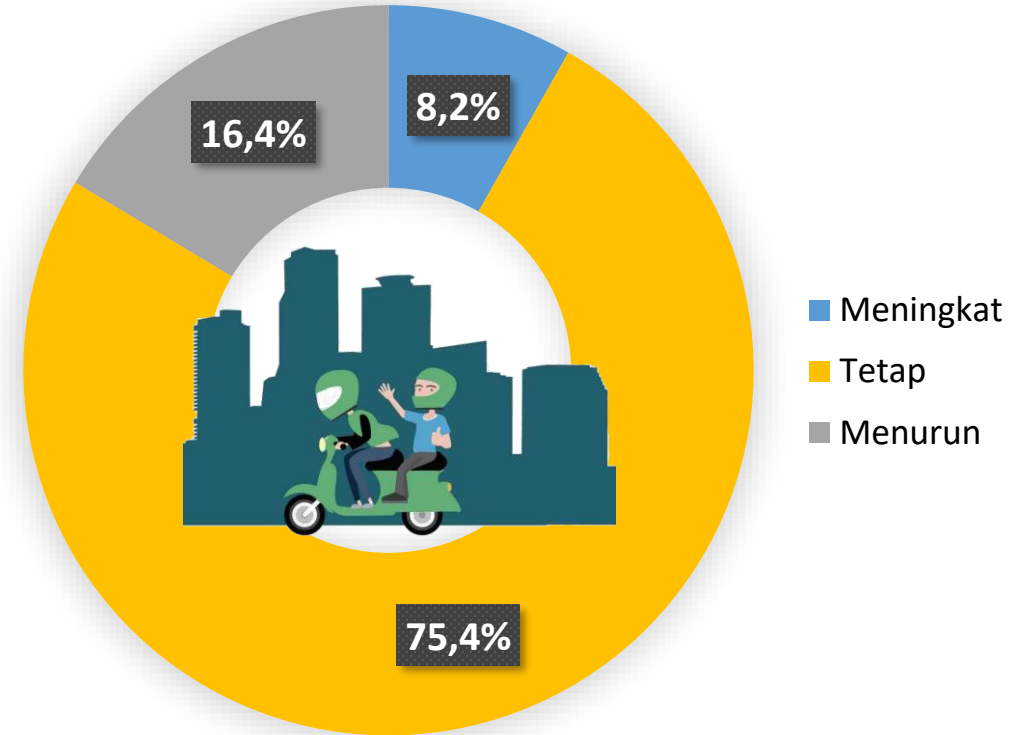
DAMPAK EKONOMI

Perubahan Pengeluaran Responden untuk pulsa/paket data selama pandemi



Dari 500 responden, terdapat **265 responden (53%) dengan pengeluaran yang meningkat untuk pulsa/paket data** selama pandemi, 29 responden (5,8%) yang menurun dan 206 responden tetap (41,2%).

Perubahan Pengeluaran Responden untuk transportasi umum (termasuk transportasi *online*) selama pandemi



Dari 500 responden, terdapat **41 responden (8,2%) dengan pengeluaran yang meningkat** untuk transportasi umum (termasuk transportasi *online*) selama pandemi, 82 responden (16,4%) yang menurun dan 377 responden tetap (75,4%).

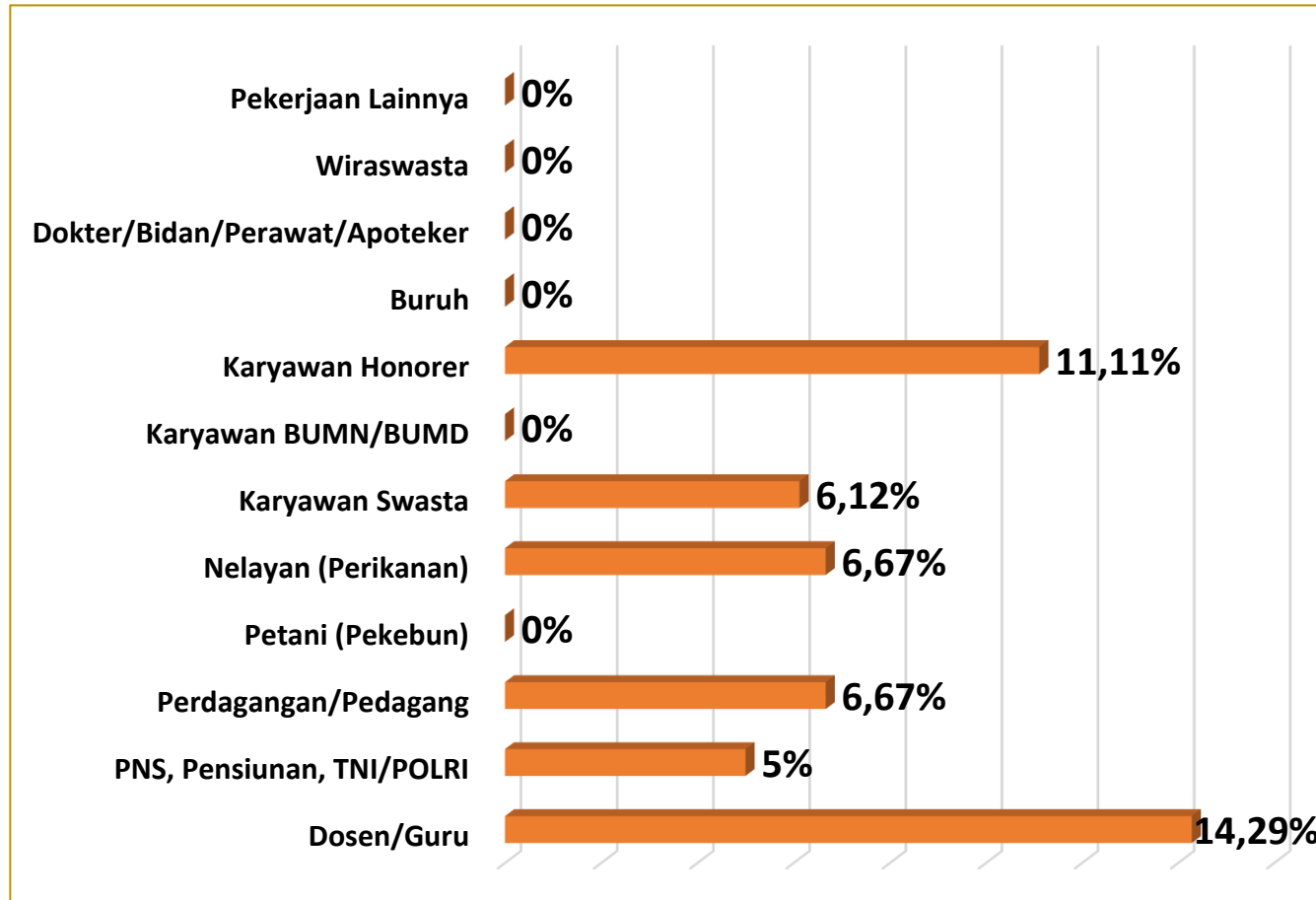
DAMPAK EKONOMI

Tabulasi Silang Pekerjaan Responden dan Penerapan WFH

Pekerjaan	Penerapan WFH				TOTAL
	WFH	Masih Ada Jadwal Kantor	Tidak WFH	Tidak Memungkinkan WFH	
Dosen/Guru	2 (14,29%)	10 (71,43%)	1 (7,14%)	1 (7,14%)	14 (100%)
PNS, Pensiunan, TNI/POLRI	2 (5%)	29 (72,5%)	5 (12,5%)	4 (10%)	40 (100%)
Perdagangan/Pedagang	1 (6,67%)	2 (13,33%)	0 (0%)	12 (80%)	15 (100%)
Petani (Pekebun)	0 (0%)	1 (7,69%)	3 (23,08%)	9 (69,23%)	13 (100%)
Nelayan (Perikanan)	1 (6,67%)	0 (0%)	3 (20%)	11 (73,33%)	15 (100%)
Karyawan Swasta	15 (6,12%)	64 (26,12%)	112 (45,71%)	54 (22,04%)	245 (100%)
Karyawan BUMN/BUMD	0 (0%)	13 (54,17%)	2 (8,33%)	9 (37,5%)	24 (100%)
Karyawan Honorer	1 (11,11%)	5 (55,56%)	1 (11,11%)	2 (22,22%)	9 (100%)
Buruh	0 (0%)	3 (12%)	1 (4%)	21 (84%)	25 (100%)
Dokter/Bidan/Perawat/Apoteker	0 (0%)	0 (0%)	6 (85,71%)	1 (14,29%)	7 (100%)
Wiraswasta	0 (0%)	1 (1,32%)	8 (10,53%)	67 (88,16%)	76 (100%)
Pekerjaan Lainnya	0 (0%)	0 (0%)	8 (47,06%)	9 (52,94%)	17 (100%)
TOTAL	22	128	150	200	500

DAMPAK EKONOMI

Bidang Pekerjaan Responden yang WFH

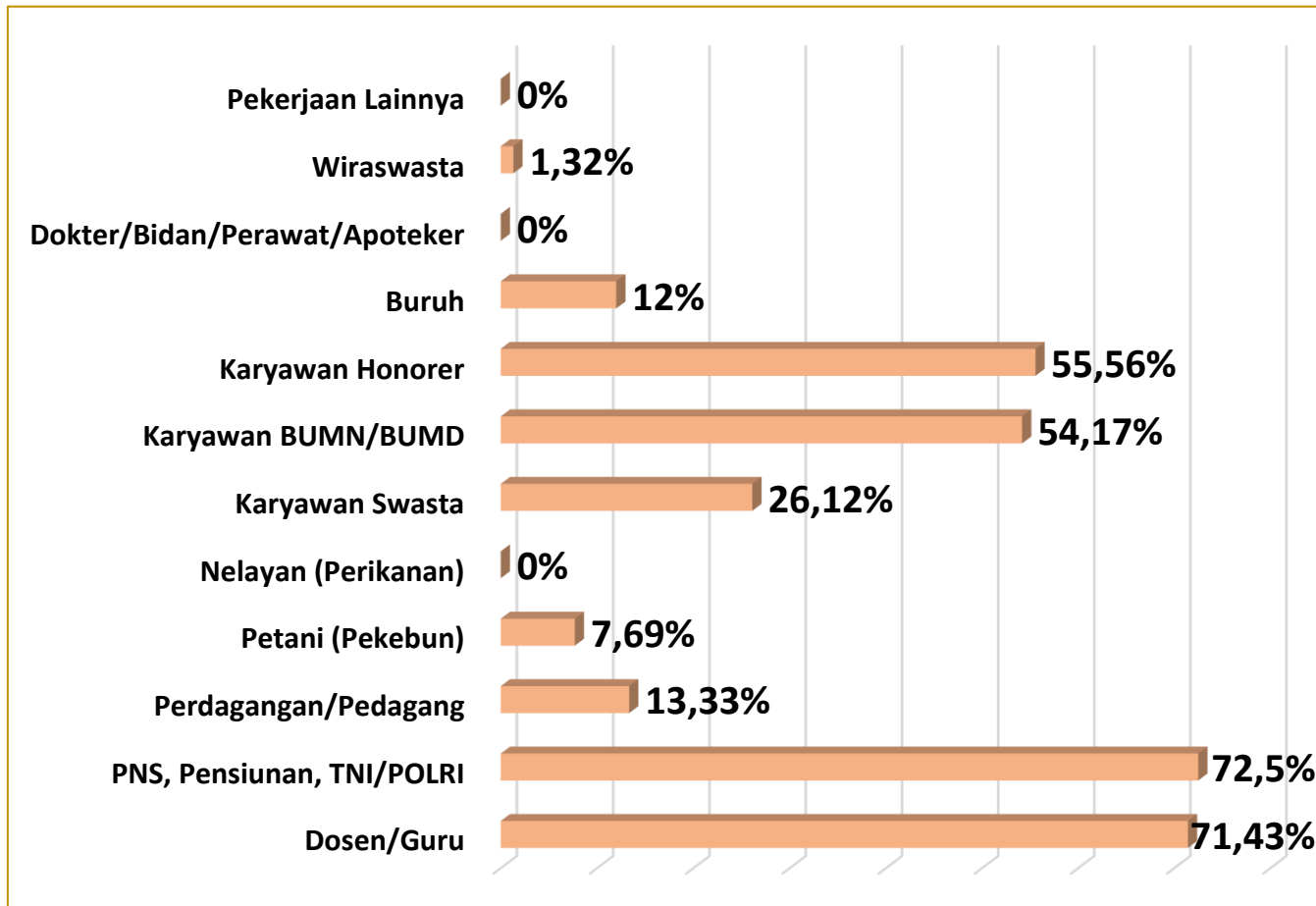


Persentase bidang pekerjaan terbesar yang selalu bekerja dari rumah sejak kebijakan WFH ditetapkan adalah **Dosen/Guru (14,29%)**. Tidak ada petani (pekebun), karyawan BUMN/BUMD, buruh, dokter/bidan/perawat/apoteker, wiraswasta dan pekerjaan lainnya yang selalu bekerja dari rumah sejak kebijakan WFH ditetapkan.



DAMPAK EKONOMI

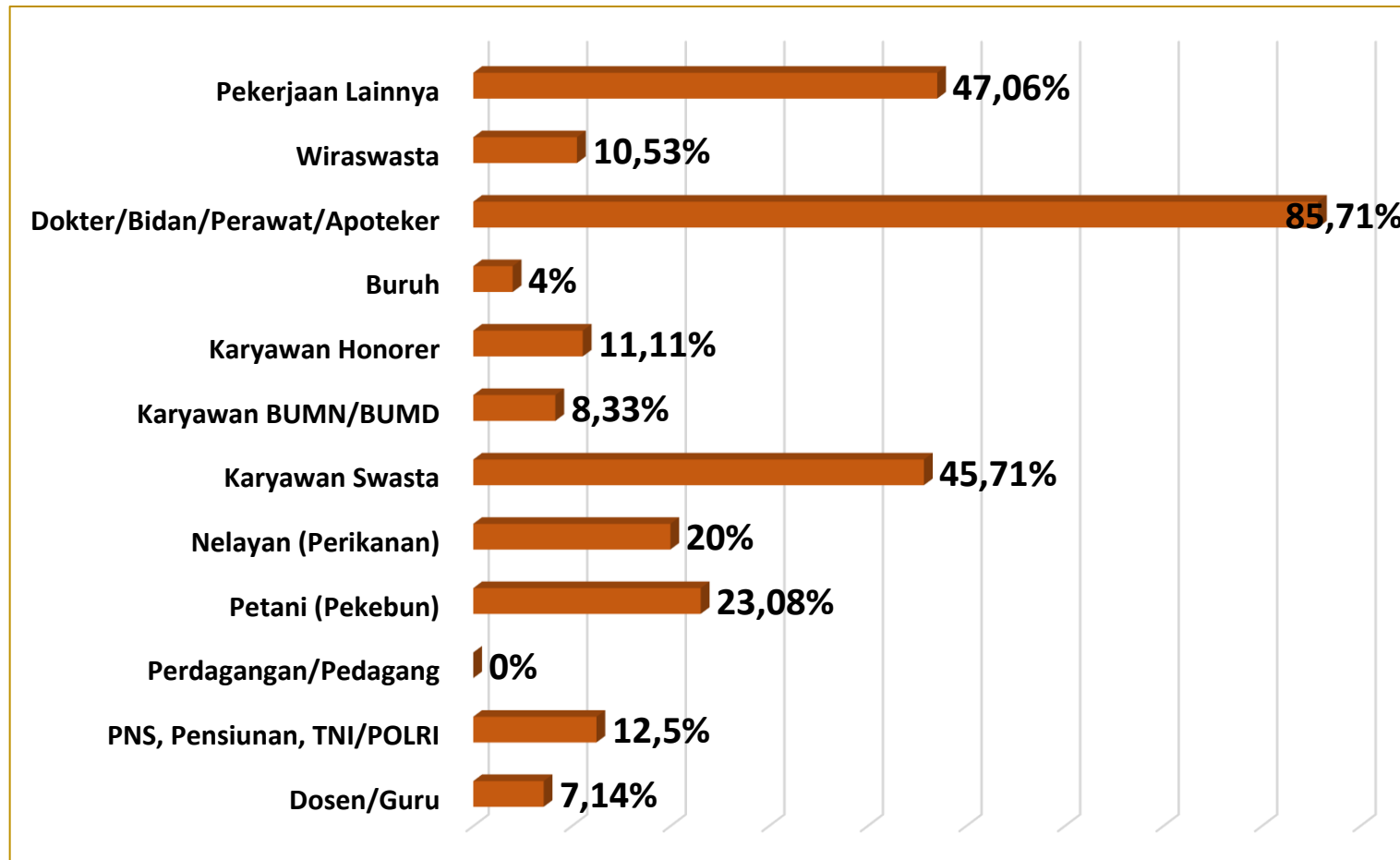
Bidang Pekerjaan Responden yang Masih Ada Jadwal Masuk Kantor



Persentase bidang pekerjaan terbesar yang masih ada jadwal masuk kantor sejak kebijakan WFH ditetapkan adalah PNS ,TNI/POLRI (72,5%).

DAMPAK EKONOMI

Bidang Pekerjaan Responden yang Masuk Seperti biasa

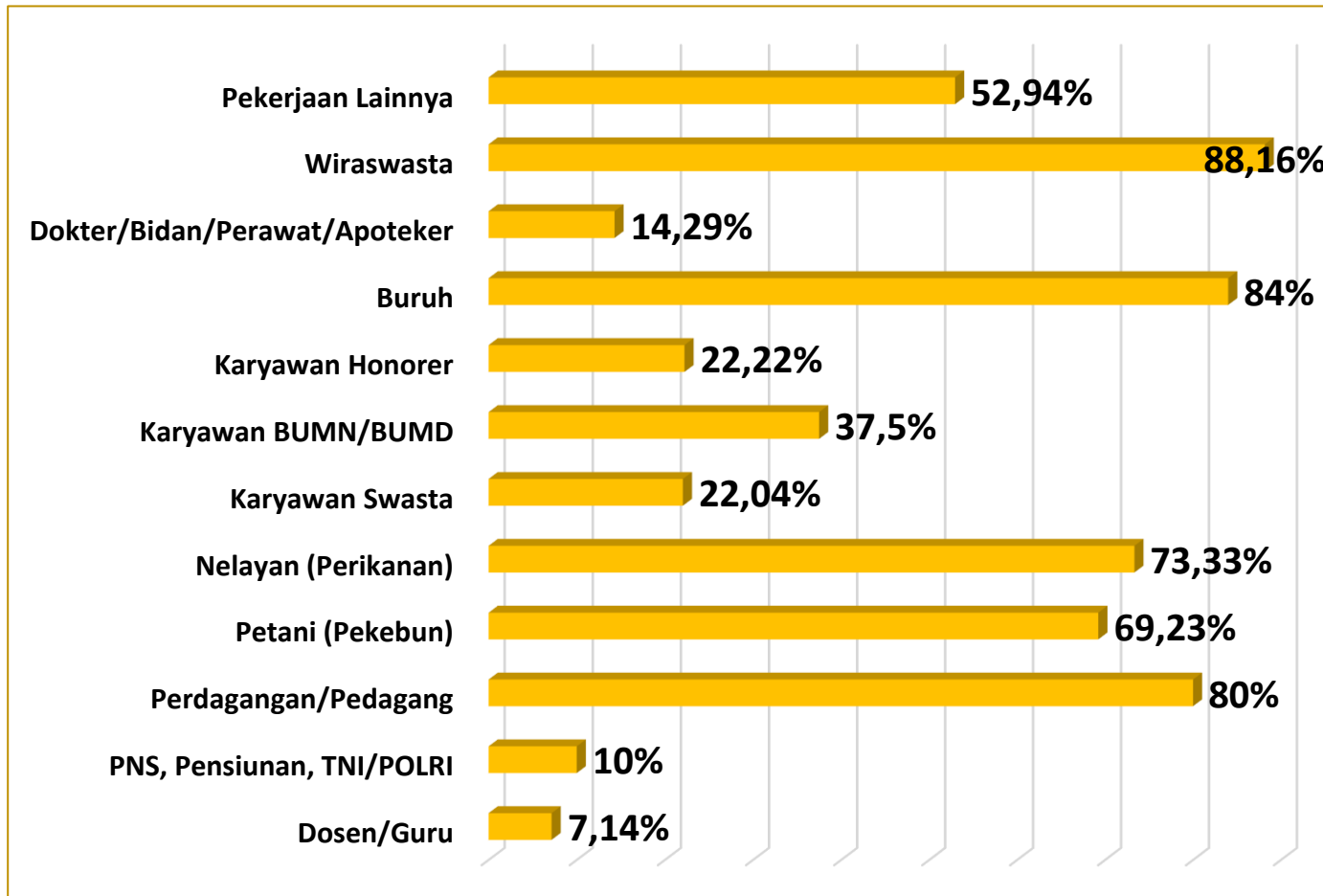


Persentase bidang pekerjaan terbesar yang masuk seperti biasa sejak kebijakan WFH ditetapkan adalah **Dokter/Bidan/Perawat/Apoteker (85,71%)**.



DAMPAK EKONOMI

Bidang Pekerjaan Responden yang Tidak Memungkinkan WFH



Persentase bidang pekerjaan terbesar yang tidak memungkinkan WFH adalah **wiraswasta (88,16%)**.



DAMPAK EKONOMI

Tabulasi Silang Pekerjaan dan Pendapatan Responden

3 sektor tertinggi dengan pendapatan $\leq 0,5$ juta rupiah adalah Petani (30,77%), Pedagang (26,67%), Karyawan Swasta (8,98%).

3 sektor tertinggi dengan pendapatan $0,5 < p \leq 2$ juta rupiah adalah Karyawan Swasta (46,67%), Petani (46,15%), Pekerjaan lainnya (35,29%).

Pekerjaan	Pendapatan (Juta Rupiah)					Total
	$\leq 0,5$	$0,5 < p \leq 2$	$2 < p \leq 3,5$	$3,5 < p \leq 5$	> 5	
Dosen/Guru	1 (7,14%)	4 (28,57%)	0 (0%)	5 (35,71%)	4 (28,57%)	14 (100%)
PNS, Pensiunan, TNI/POLRI	1 (2,5%)	1 (2,5%)	2 (5%)	13 (32,5%)	23 (57,5%)	40 (100%)
Perdagangan/Pedagang	4 (26,67%)	9 (60%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (13,33%)	15 (100%)
Petani (Pekebun)	4 (30,77%)	6 (46,15%)	3 (23,08%)	0 (0%)	0 (0%)	13 (100%)
Nelayan (Perikanan)	1 (6,67%)	7 (46,67%)	7 (46,67%)	0 (0%)	0 (0%)	15 (100%)
Karyawan Swasta	22 (8,98%)	65 (26,53%)	121 (49,39%)	26 (10,61%)	11 (4,49%)	245 (100%)
Karyawan BUMN/BUMD	1 (4,17%)	0 (0%)	3 (12,5%)	11 (45,83%)	9 (37,5%)	24 (100%)
Karyawan Honorer	0 (0%)	1 (11,11%)	6 (66,67%)	2 (22,22%)	0 (0%)	9 (100%)
Buruh	10 (40%)	7 (28%)	6 (24%)	2 (8%)	0 (0%)	25 (100%)
Dokter/Bidan/Perawat/Apoteker	0 (0%)	2 (28,57%)	1 (14,29%)	1 (14,29%)	3 (42,86%)	7 (100%)
Wiraswasta	3 (3,95%)	21 (27,63%)	19 (25%)	15 (19,74%)	18 (23,68%)	76 (100%)
Pekerjaan Lainnya	1 (5,88%)	6 (35,29%)	7 (41,18%)	2 (11,76%)	1 (5,88%)	17 (100%)
Total	48	129	175	77	71	500

3 sektor tertinggi dengan pendapatan $2 < p \leq 3,5$ juta rupiah adalah Karyawan Honorer (66,67%), Karyawan Swasta (49,39%), Nelayan (46,67%).

DAMPAK EKONOMI

Tabulasi Silang Pekerjaan dan Dampak Pandemi pada Pendapatan Responden

Pekerjaan	Dampak Pandemi			Total
	Meningkat	Tetap	Menurun	
Dosen/Guru	0 (0%)	10 (71,43%)	4 (28,57%)	14 (100%)
PNS, Pensiunan, TNI/POLRI	2 (5%)	32 (80%)	6 (15%)	40 (100%)
Perdagangan/Pedagang	0 (0%)	2 (13,33%)	13 (86,67%)	15 (100%)
Petani (Pekebun)	0 (0%)	2 (15,38%)	11 (84,62%)	13 (100%)
Nelayan (Perikanan)	0 (0%)	4 (26,67%)	11 (73,33%)	15 (100%)
Karyawan Swasta	14 (5,71%)	149 (60,82%)	82 (33,47%)	245 (100%)
Karyawan BUMN/BUMD	2 (8,33%)	19 (79,17%)	3 (12,5%)	24 (100%)
Karyawan Honorer	0 (0%)	8 (88,89%)	1 (11,11%)	9 (100%)
Buruh	0 (0%)	5 (20%)	20 (80%)	25 (100%)
Dokter/Bidan/Perawat/Apoteker	2 (28,57%)	4 (57,14%)	1 (14,29%)	7 (100%)
Wiraswasta	2 (2,63%)	13 (17,11%)	61 (80,26%)	76 (100%)
Pekerjaan Lainnya	0 (0%)	5 (29,41%)	12 (70,59%)	17 (100%)
Total	22	253	225	500

5 sektor tertinggi dengan pendapatan menurun adalah:

1. Pedagang **(86,67%)**.
2. Petani **(84,62%)**.
3. Wiraswasta **(80,26%)**.
4. Buruh **(80%)**.
5. Nelayan **(73,33%)**.



DAMPAK EKONOMI

Tabulasi Silang Pekerjaan dan Persentase Peningkatan Pendapatan Responden

Pekerjaan	Peningkatan (%)				Total
	< 25	25 ≤ p < 50	50 ≤ p < 75	75 ≤ p < 100	
Dosen/Guru	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1
PNS, Pensiunan, TNI/POLRI	2 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2
Perdagangan/Pedagang	0	0	0	0	0
Petani (Pekebun)	0	0	0	0	0
Nelayan (Perikanan)	0	0	0	0	0
Karyawan Swasta	8 (53,33%)	4 (26,67%)	2 (13,33%)	1 (6,67%)	15
Karyawan BUMN/BUMD	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1
Karyawan Honorer	0	0	0	0	0
Buruh Harian Lepas/Buruh Tani (Perkebunan)/Buruh Nelayan (Perikanan)/Buruh Peternakan	0	0	0	0	0
Dokter/Bidan/Perawat/Apoteker	0 (0%)	1 (50%)	1 (50%)	0 (0%)	2
Wiraswasta	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1
Pekerjaan Lainnya	0	0	0	0	0
Total	12	6	3	1	22

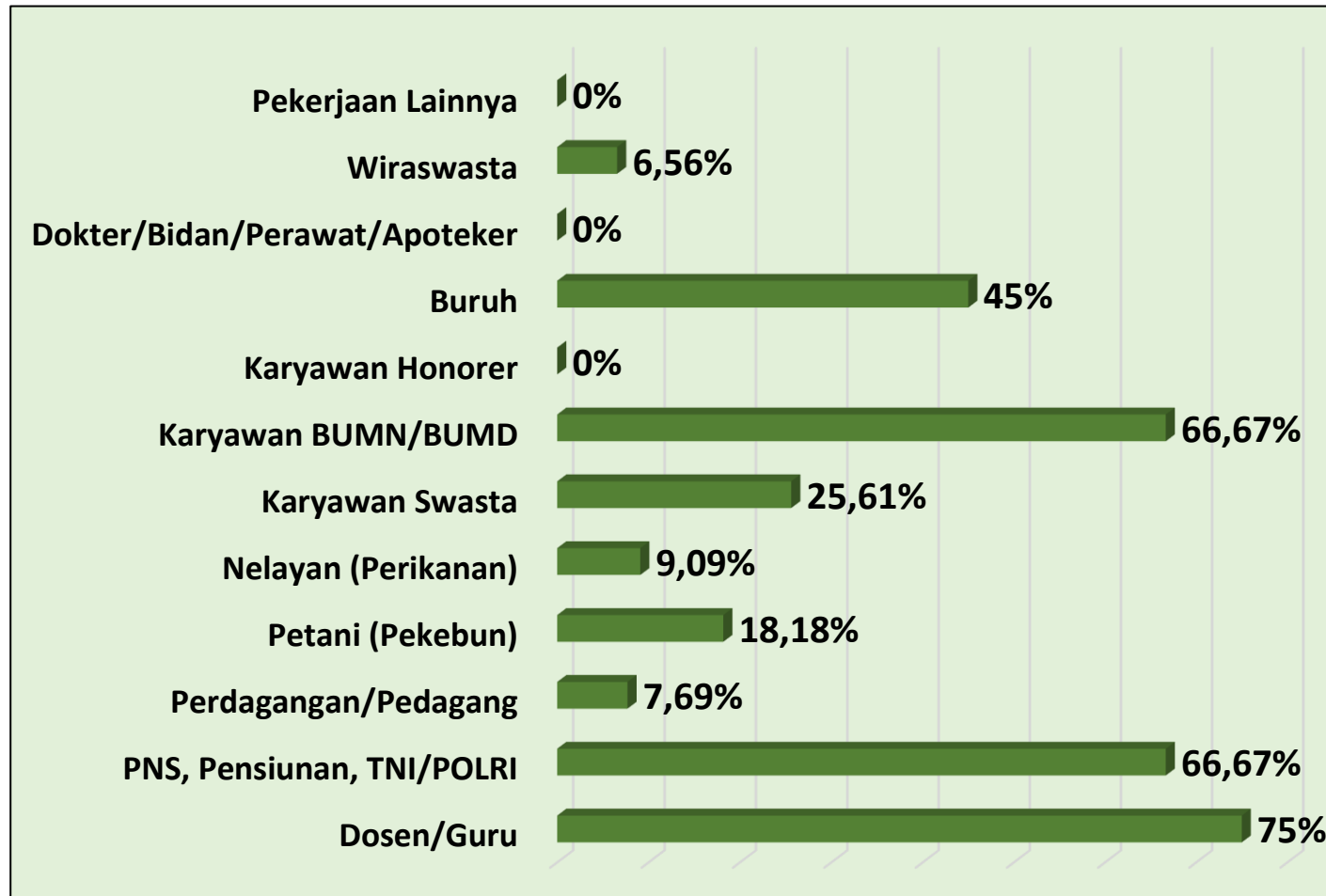
DAMPAK EKONOMI

Tabulasi Silang Pekerjaan dan Persentase Penurunan Pendapatan Responden

Pekerjaan	Penurunan (%)					Total
	< 25	25 ≤ p < 50	50 ≤ p < 75	75 ≤ p < 100	100	
Dosen/Guru	3 (75%)	0 (0%)	1 (25%)	0 (0%)	0 (0%)	4
PNS, Pensiunan, TNI/POLRI	4 (66,67%)	2 (33,33%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	6
Perdagangan/Pedagang	1 (7,69%)	2 (15,38%)	6 (46,15%)	3 (23,08%)	1 (7,69%)	13
Petani (Pekebun)	2 (18,18%)	3 (27,27%)	4 (36,36%)	2 (18,18%)	0 (0%)	11
Nelayan (Perikanan)	1 (9,09%)	5 (45,45%)	5 (45,45%)	0 (0%)	0 (0%)	11
Karyawan Swasta	21 (25,61%)	28 (34,15%)	29 (35,37%)	3 (3,66%)	1 (1,22%)	82
Karyawan BUMN/BUMD	2 (66,67%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (33,33%)	0 (0%)	3
Karyawan Honorer	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1
Buruh Harian Lepas/Buruh Tani (Perkebunan)/Buruh Nelayan (Perikanan)/Buruh Peternakan	9 (45%)	2 (10%)	6 (30%)	2 (10%)	1 (5%)	20
Dokter/Bidan/Perawat/Apoteker	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1
Wiraswasta	4 (6,56%)	24 (39,34%)	24 (39,34%)	7 (11,48%)	2 (3,28%)	61
Pekerjaan Lainnya	0 (0%)	2 (16,67%)	5 (41,67%)	2 (16,67%)	3 (25%)	12
Total	47	69	81	20	8	225

DAMPAK EKONOMI

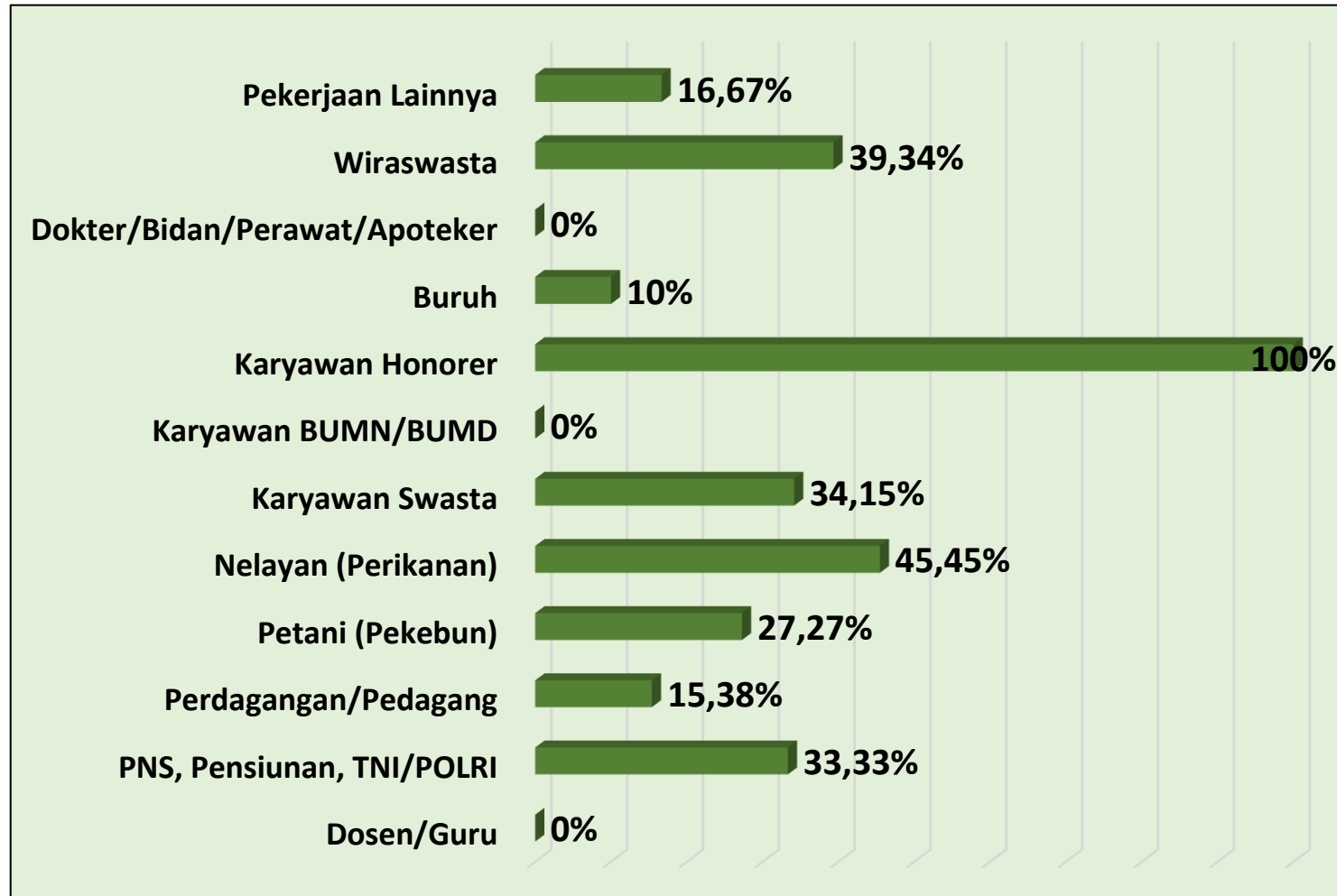
Bidang Pekerjaan Responden yang Mengalami Penurunan Pendapatan Kurang Dari 25%



Persentase bidang pekerjaan terbesar yang mengalami penurunan pendapatan **kurang dari 25%** adalah **Dosen/Guru (75%)**.

DAMPAK EKONOMI

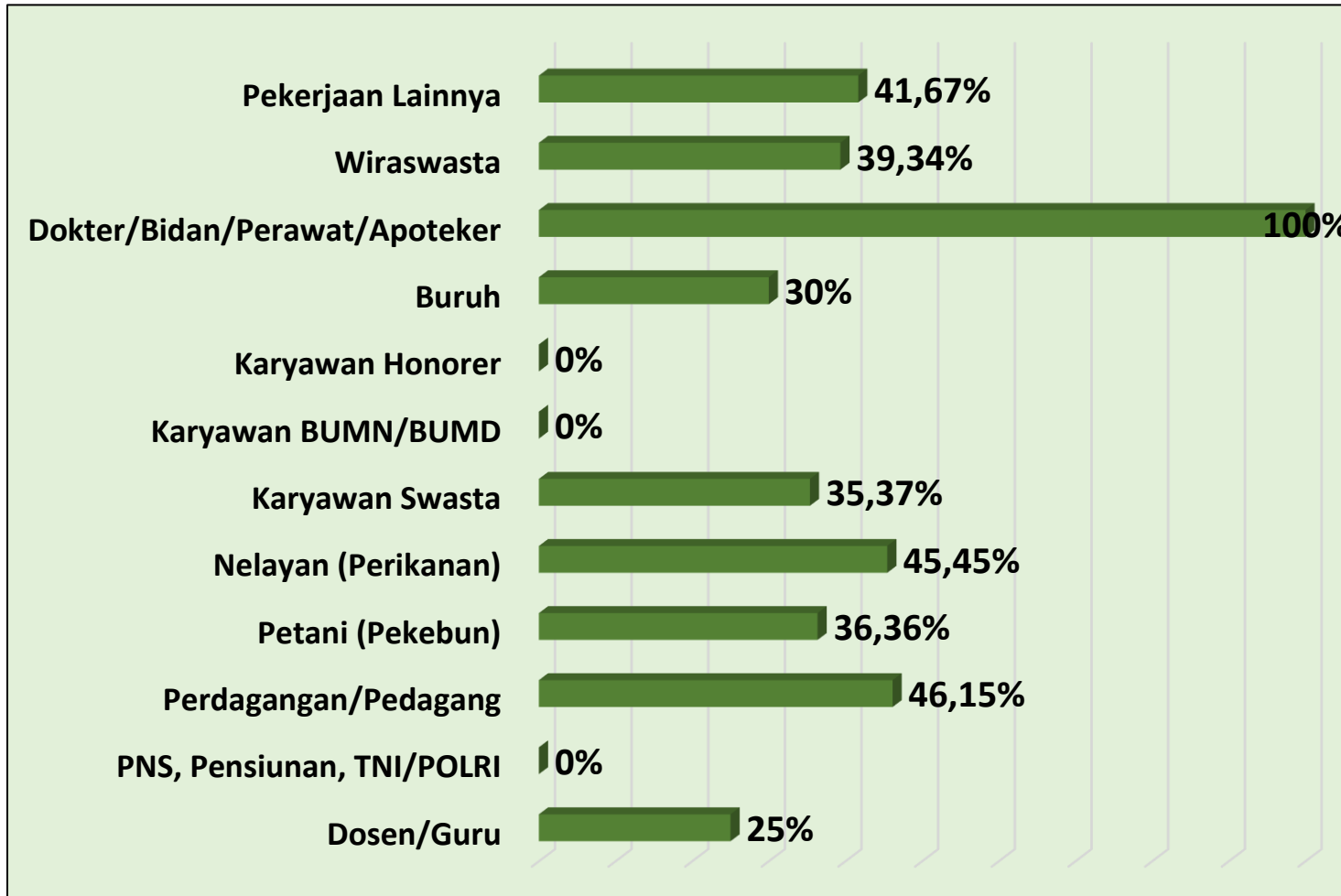
Bidang Pekerjaan Responden yang Mengalami Penurunan Pendapatan 25% sampai <50%



Persentase bidang pekerjaan terbesar yang mengalami penurunan pendapatan 25% sampai <50% adalah karyawan honorer (100%).

DAMPAK EKONOMI

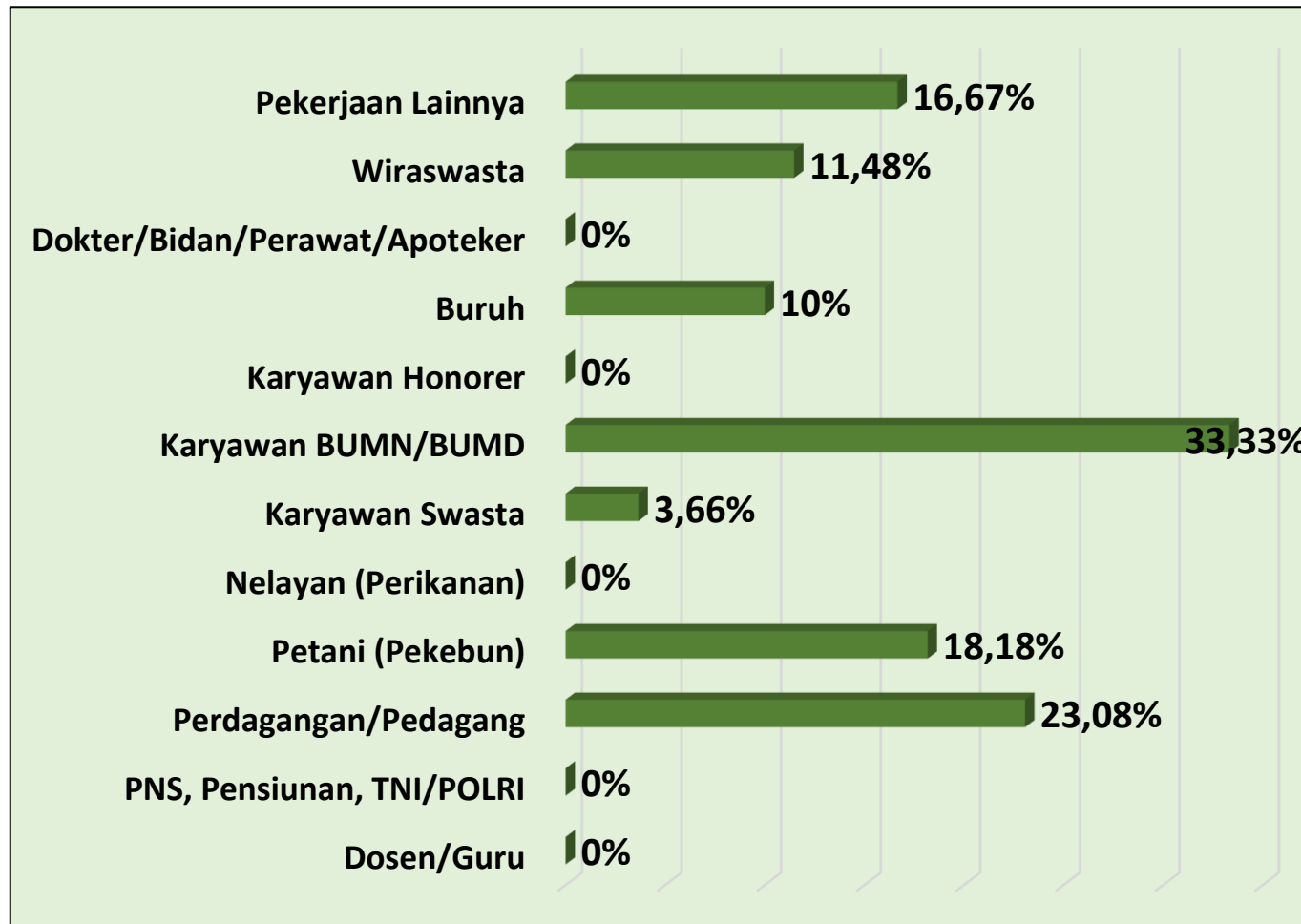
Bidang Pekerjaan Responden yang Mengalami Penurunan Pendapatan 50% sampai <75%



Persentase bidang pekerjaan terbesar yang mengalami penurunan pendapatan 50% sampai <75% adalah Tenaga Kesehatan (100%).

DAMPAK EKONOMI

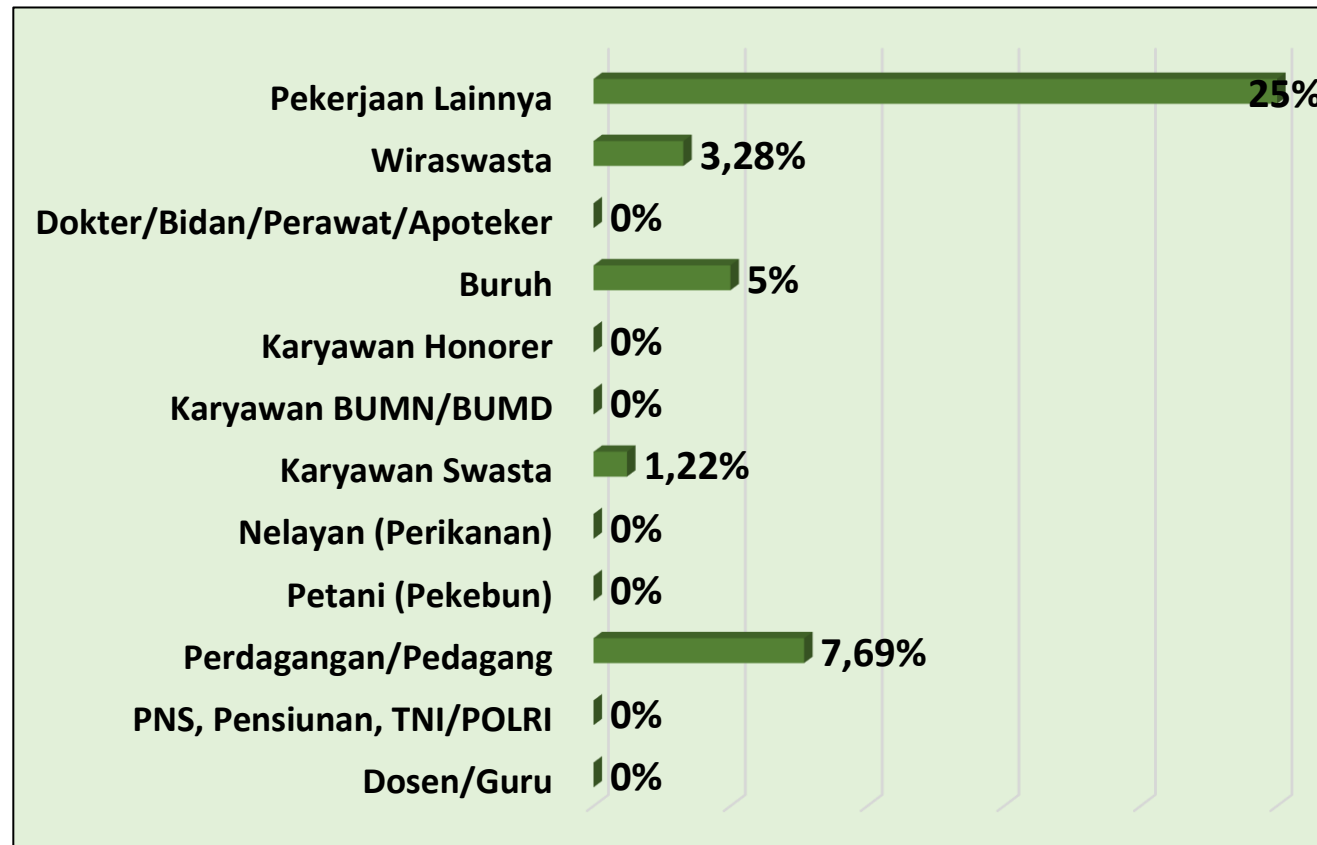
Bidang Pekerjaan Responden yang Mengalami Penurunan Pendapatan 75% sampai <100%



Persentase bidang pekerjaan terbesar yang mengalami penurunan pendapatan 75% sampai <100% adalah **Karyawan BUMN/BUMD (33,33%)**

DAMPAK EKONOMI

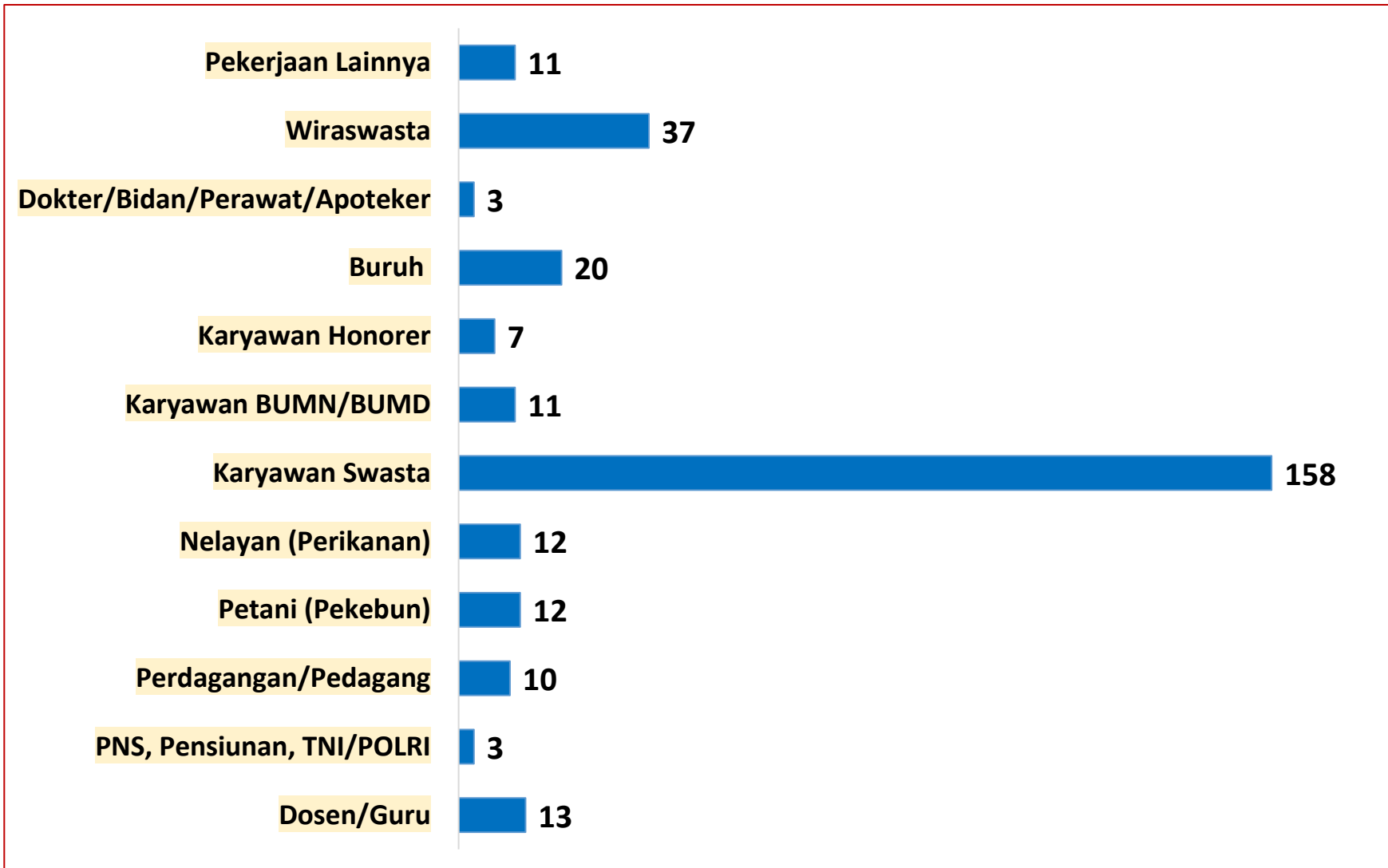
Bidang Pekerjaan Responden yang Mengalami Penurunan Pendapatan 100%



Persentase bidang pekerjaan terbesar yang mengalami penurunan pendapatan 100% adalah pekerjaan lainnya yakni seperti Sopir, Tukang Batu, Mekanik, Tukang Kayu, Pembantu Rumah Tangga dan Tukang Jahit.

DAMPAK EKONOMI

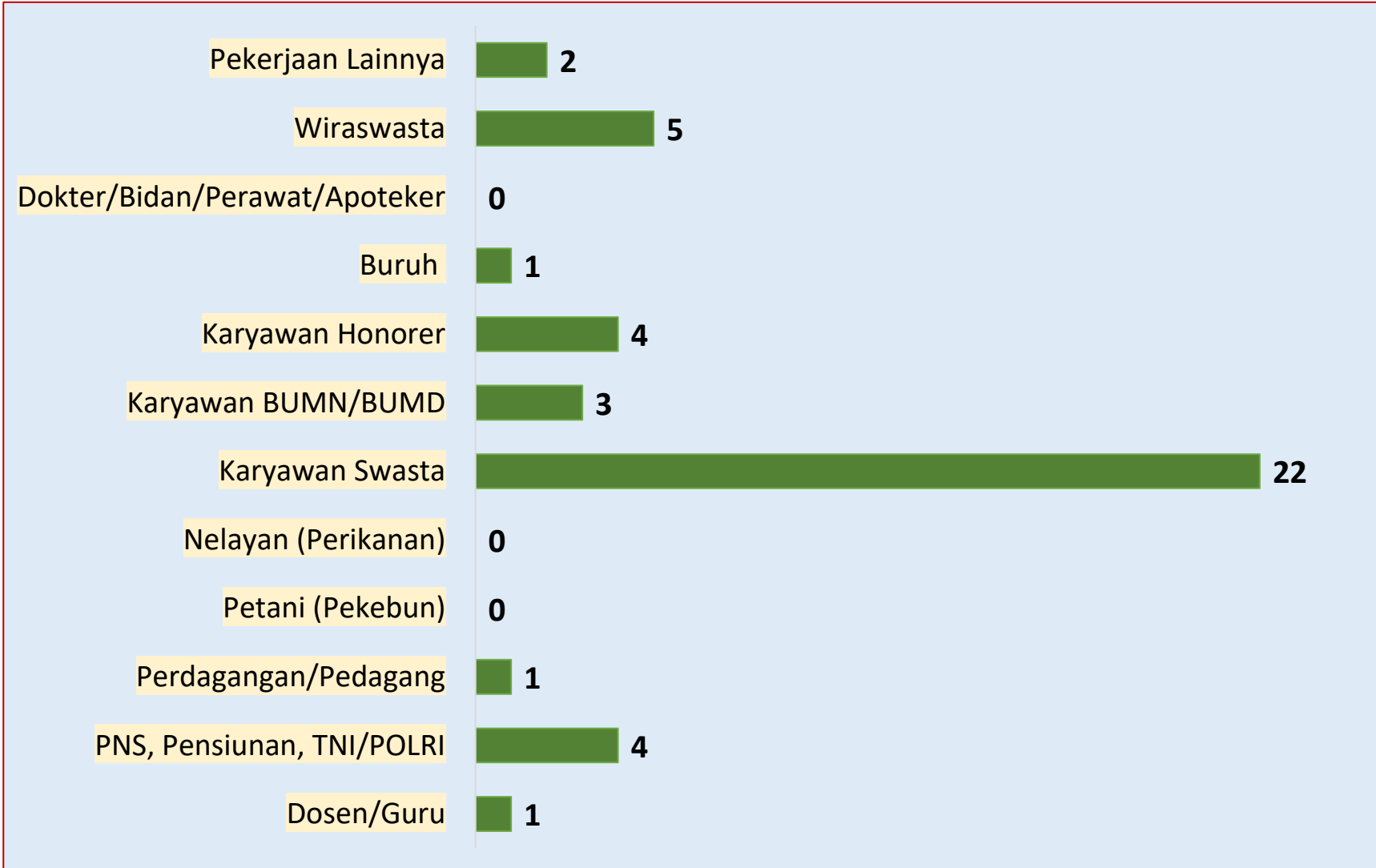
Bidang Pekerjaan Responden yang Pernah Menerima Bantuan



Dari 297 responden yang pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah ataupun perusahaan, paling banyak adalah **karyawan swasta yaitu 158 orang** dan paling sedikit adalah PNS, Pensiunan, TNI/POLRI dan Tenaga Kesehatan yaitu 3 orang.

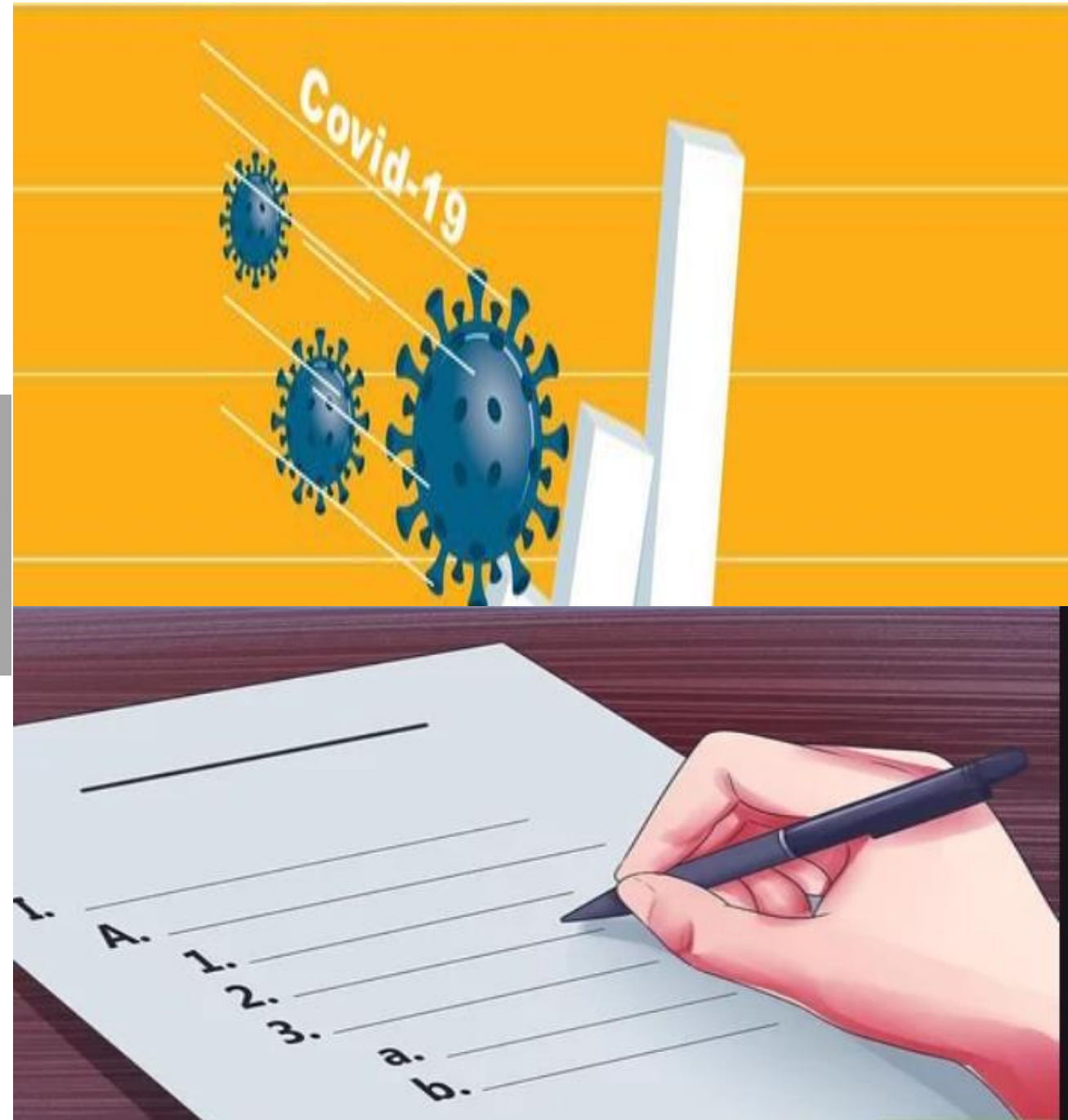
DAMPAK EKONOMI

Bidang Pekerjaan Responden yang Pernah Terinfeksi COVID-19



Dari 43 responden yang terinfeksi virus COVID-19, **22 orang diantaranya adalah karyawan swasta** sedangkan Petani (Pekebun), Nelayan (Perikanan), Tenaga Kesehatan tidak ada yang terinfeksi virus COVID-19.

REKOMENDASI



REKOMENDASI 1

Ditengah pandemi *COVID-19*, peran swasta dalam menstimulus ekonomi khususnya di Kota Bontang menjadi sangat terbatas, sehingga Pemerintah Kota Bontang perlu memaksimalkan perannya dalam menstimulus perekonomian melalui **kebijakan anggaran, baik berupa belanja langsung maupun belanja tidak langsung.**



REKOMENDASI 2

Skema Jaring Pengaman Sosial baik yang bersumber dari APBN maupun dari APBD yang difasilitasi oleh Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat, yaitu:



REKOMENDASI 2

Bantuan langsung tunai kepada para karyawan swasta yang terkena PHK atau dirumahkan.



Bantuan langsung tunai keluarga buruh, petani dan nelayan yang tidak terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Bantuan lansia sebesar 200juta untuk 250 jiwa lansia.



- ✓ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 4.484 jiwa,
- ✓ Program Keluarga Harapan (PKH) 2.356 jiwa,
- ✓ Program Keluarga Harapan (PMKS) 642 jiwa (bansos disabilitas) sebesar 41juta,

REKOMENDASI 3

Skema Kebijakan Ekonomi



Bantuan modal kerja bagi pedagang.



Bantuan paket sembako dan pasar murah.



Bantuan langsung tunai bagi pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil) dalam hal ini wiraswasta.



Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan kepada UKM, dalam menyongsong era ekonomi digital.

REKOMENDASI 4

Pemerintah dan masyarakat sama-sama bersinergi mengendalikan pandemi *COVID-19*, seperti menjaga dan disiplin menerapkan Protokol Kesehatan dan vaksinasi massal.

We're Open!
WITH
Health Protocol



REKOMENDASI 5

Inkubator bisnis dengan melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta untuk pengembangan UMKM.



REKOMENDASI 6

Melakukan survey lanjutan terhadap sektor-sektor yang terdampak.



REKOMENDASI 7

Program prioritas pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro:

- a. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
- b. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)
- c. Program Pengembangan UMKM



Thank You!

